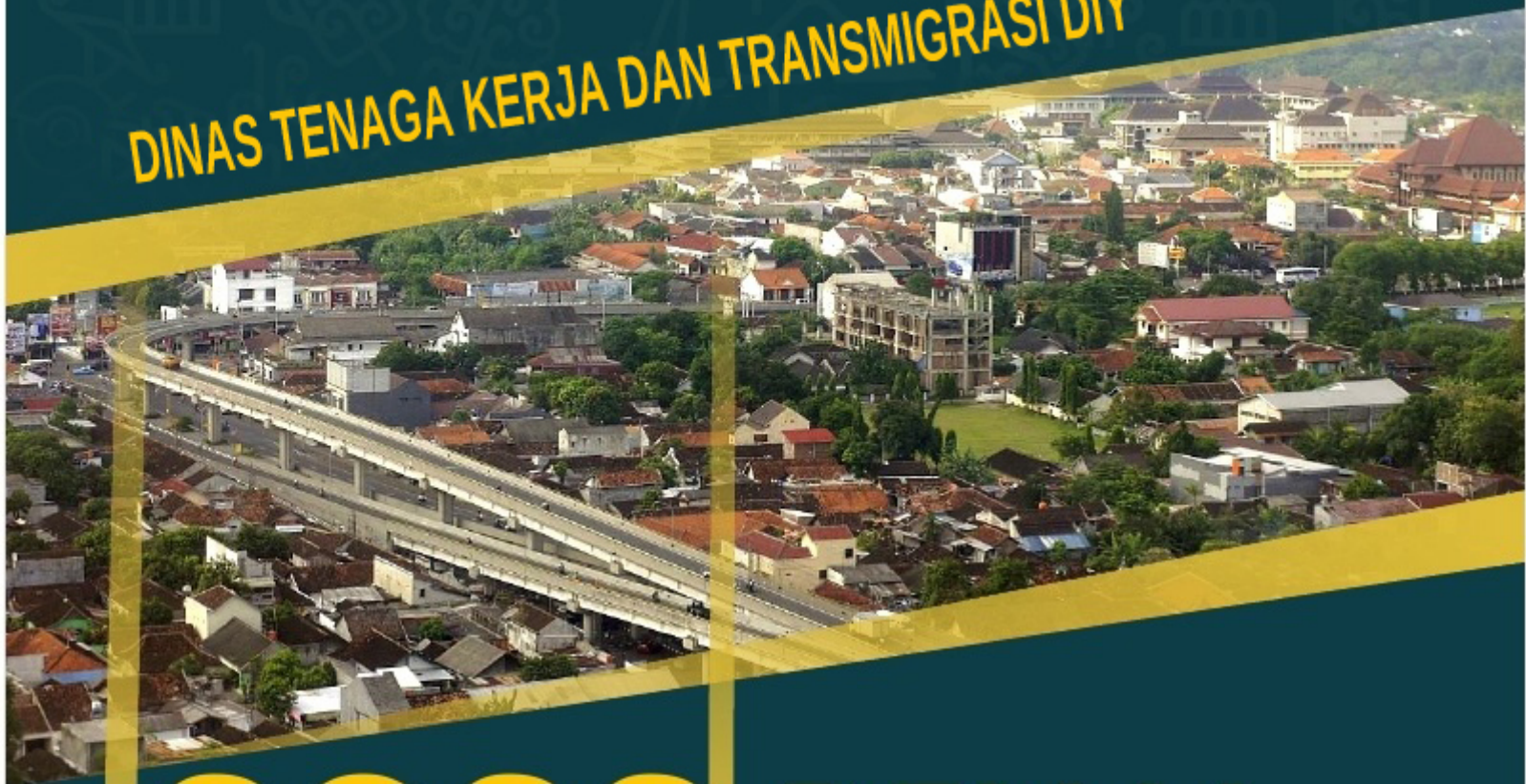


DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY



2022

RENJA

Rencana Kerja



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 050/ 07467

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa, dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

- 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 - h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI tahun 2006 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4663);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
 - j. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - l. Permendagri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

- Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- n. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah);
 - o. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
 - p. Perdaes Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - q. Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022;
 - r. Peraturan Gubernur DIY Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
 - s. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - t. Peraturan Gubernur No 92 Tahun 2018 Tentang Pembentukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;

- u. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Tanggal 29 Juni 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menunjuk Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

Tugas Tim Pelaksana Penyusunan Renja:

KEDUA : - Mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menganalisis data Rencana Kerja 2022
- Membahas dan mencermati perencanaan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
- Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Renja

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana Penyusunan Renja 2022 bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk tahun anggaran 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 23 Juli 2021

Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY



ARIA NUGRAHADI, ST, M. Eng
NIP. 19740919 199903 1004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2022
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No	N A M A	JABATAN	JABATAN DLM TIM	HONORARIUM (Rp.)
1.	Aria Nugrahadi,ST,M.Eng	Kepala Dinas	Penanggungjawab	Tanpa honor
2.	Sriyati,SPd,MM	Sekretaris	Ketua	Tanpa honor
3.	Tri Suryani Dyah W,SE	Kasubbag Program	Sekretaris	Tanpa honor
4.	Elly Supriyanti K,S.Psi,Mec.Dev	Kabid P2TKPKKT	Anggota	Tanpa honor
5.	Tuty Amalia,SH,M.Si	Kabid P2SP	Anggota	Tanpa honor
6.	Ariyanto Wibowo,SH,M.Hum	Kabid HI dan JSTK	Anggota	Tanpa honor
7.	Amin Subargus,M.Kes	Kabid PK3	Anggota	Tanpa honor
8.	Drs.Basuki Murdowo,MSi	Kepala BLKPP	Anggota	Tanpa honor
9.	Endang Siwi Ediningsih,ST,MM	Kepala Balai K3	Anggota	Tanpa Honor
10.	Rhina Sulistyowati,SE,MBA	Staf Subbag Program	Anggota	Tanpa Honor
11.	Didik Sunardi,ST	Staf Subbag Program	Anggota	Tanpa Honor
12.	Rohmah Woro Hayati,SH	Staf Subbag Program	Anggota	Tanpa Honor

Ditetapkan di : YOGYAKARTA
 Pada Tanggal : 23 Juli 2021

Kepala
 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY


ARIA NUGRAHADI,ST,M.Eng
 NIP.197409191999031004

Formulir E.29
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Th 2022
Dinas: Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
Provinsi : DIY

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsidan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra-Perangkat Daerah provinsi.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan.	√			

Yogyakarta, 23 Juli 2021
 KEPALA TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


Aria Nugrahadi, ST, M.Eng
 NIP. 19740919 199903 1004

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat karunia-Nya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY berhasil menyusun Renja Tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian selama periode tahun 2022.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renja Tahun 2022 ini sehingga saran dan masukan masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Yogyakarta,

2021

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Daerah Istimewa Yogyakarta



ARIA NUGRAHADI, ST, M. Eng
NIP.197409191999031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Landasan Hukum	1-5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-10
1.4 Sistematika Penulisan	1-10
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	2-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	2-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-3
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	2-3
2.4 Review terhadap KPD	2-9
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	3-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	3-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	3-1
3.3 Program dan Kegiatan	3-1
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	4-1
BAB 5 PENUTUP	5-1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan untuk mendorong pembangunan yang bersifat berkelanjutan serta semangat untuk menempatkan manusia sebagai tujuan pembangunan. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah juga harus mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa. Implikasinya pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga harus diselaraskan dengan skema pembangunan Republik Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan oleh semua daerah dan nasional tertuang dalam konsitusi yang merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan yang telah diamanatkan secara lebih tegas dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan telah ditindaklanjuti dengan beberapa aturan-aturan pelaksanaan dan teknis. Khusus untuk DIY, pembangunan juga mengacu pada semangat renaissance dan mengakomodir pelaksanaan urusan keistimewaan dengan membawa filosofi yang mendasari pembangunan DIY yaitu Hamemayu Hayuning Bawana. Filosofi itu adalah cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya. Hamemayu Hayuning Bawana mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan baik dalam skala kecil (keluarga), ataupun masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan

mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri.

Tahun 2022 memiliki posisi yang penting yaitu tahun terakhir dalam RPJMD DIY 2017-2022. Dengan demikian, tahun 2022 mestinya menjadi kesempatan terakhir untuk mengejar target-target pembangunan yang belum tercapai pada periode RPJMD ini. Sementara itu, pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mengubah prioritas pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pandemi Covid-19 dampaknya cukup terasa bagi perekonomian DIY dan diperkirakan akan mengganggu pencapaian target-target pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja harus memperhatikan dan mensinergikan dengan RPJM Kementerian Ketenagakerjaan, RPJM Kemendes PDT dan Transmigrasi, RPJM Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan.

Undang-undang nomor 25 tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan daerah mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun. Selain itu undang-undang nomor 25 juga mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk

menyusun dokumen perencanaan, yakni Rencana Strategis (Renstra) untuk kurun waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk kurun waktu 1 tahun.

Pada setiap tahun anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merencanakan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan melakukan evaluasi terhadap program kegiatan tahun berjalan. Untuk itulah satuan kerja perangkat daerah menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja OPD merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

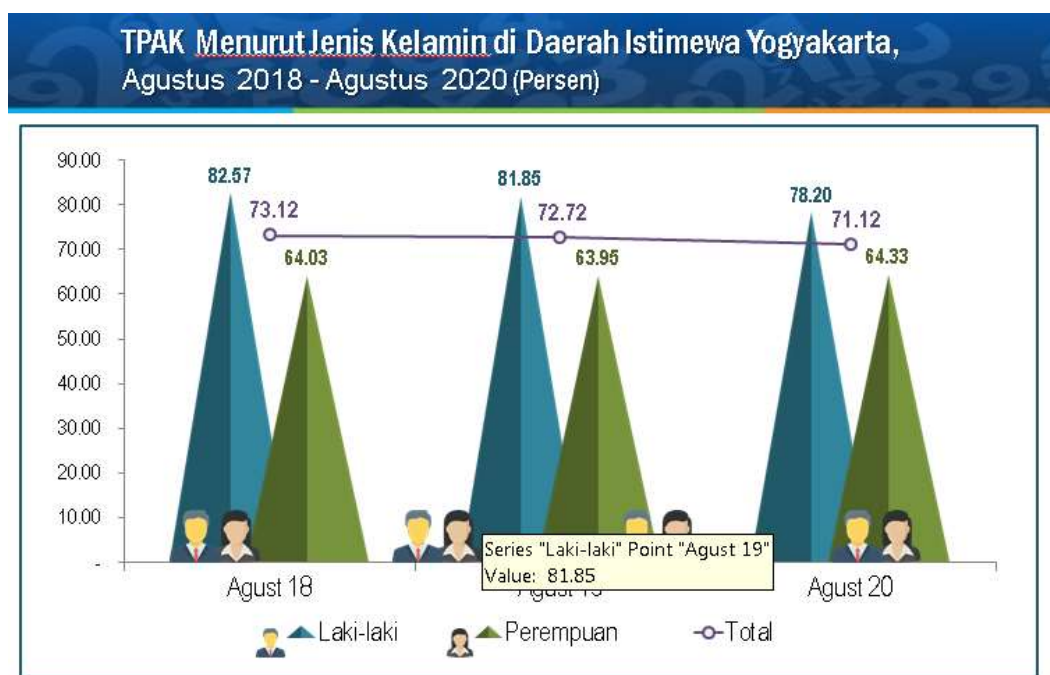
Rencana kerja OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY merupakan dokumen perencanaan satu tahunan yang merupakan wujud **‘apa yang akan dikerjakan’** dari **‘apa yang ingin dicapai’** melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY akan menuju Tujuan dan Sasaran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai unsur pemerintah, maupun yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pada setiap tahun anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merencanakan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan melakukan evaluasi terhadap program kegiatan tahun berjalan. Untuk itulah satuan kerja perangkat daerah menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja OPD merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Pada tahun 2020 akan dilakukan upaya melalui program kegiatan yang dapat mengatasi bidang ketenagakerjaan khususnya penganggur berpendidikan tinggi dan TPAK perempuan sebagaimana data di bawah ini :

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2018 (ribu orang)	Agustus 2019 (ribu orang)	Agustus 2020 (ribu orang)
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Usia Kerja	3.044,59	3.088,83	3.132,75
Angkatan Kerja	2.226,28	2.246,19	2.228,16
Bekerja	2.151,25	2.174,71	2.126,32
Pengangguran	75,03	71,48	101,85
Bukan Angkatan Kerja	818,30	842,64	904,59
	persen	persen	persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,37	3,18	4,57
Perkotaan	4,08	3,84	5,43
Perdesaan	1,63	1,54	2,18
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,12	72,72	71,12
Laki-laki	82,57	81,85	78,20
Perempuan	64,03	63,95	64,33

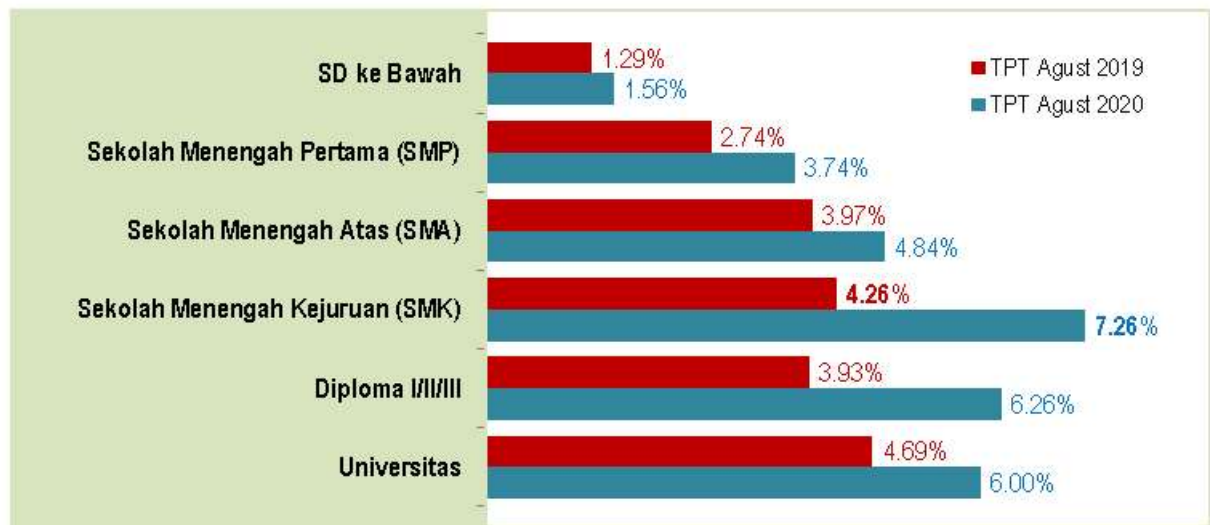
Keterangan: Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015

Tabel : Penduduk Usia kerja menurut Kegiatannya Tahun 2018 – 2020 (Sakernas Agustus, BPS)



Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin (Sakernas Agustus 2020, BPS)

TPT Menurut Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Agustus 2019 & 2020



Grafik Penganggur Menurut Pendidikan (Sakernas Agustus 2020, BPS)

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun 2022, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 550);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5

- Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 23. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan
 25. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4);
 26. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1);
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 69).
31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 45);
32. Peraturan Gubernur DIY no 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
33. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 34);
34. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
35. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
36. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Tanggal 29 Juni 2021

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja 2022 ini adalah untuk merancang program dan kegiatan tahun 2022 dengan mengacu pada RPJMD DIY, Renstra dan RKPD DIY dan memperhatikan isu-isu pembangunan yang harus diselesaikan pada tahun 2022

2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renja 2022 adalah untuk:

- a) Menyajikan data dan analisis evaluasi hasil pembangunan
- b) Merumuskan strategi yang perlu dilakukan oleh sektoral untuk mendukung tema pembangunan daerah tahun 2022
- c) Menyajikan hasil-hasil proses perencanaan partisipatorif atau bottom up, termasuk telaah atas usulan dari masyarakat yang disampaikan dalam proses musrenbang
- d) Menyajikan telaah atas pokok-pokok pikiran DPRD
- e) Melakukan penyelarasan dengan rencana pembangunan tingkat nasional (K/L) dan rencana pembangunan di kabupaten/kota
- f) Melakukan identifikasi dan rumusan kegiatan lintas sector yang dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan
- g) Merumuskan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan tahun 2022 yang mencakup lokasi, pagu indikatif dan keluaran-keluaran dan hasilnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), Renja OPD disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra OPD dan Memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Sistematika penyusunan Renja OPD adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.
2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
4. Review terhadap RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3. Program dan Kegiatan

BAB VI PENUTUP

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun 2017-2022. Pelaksanaan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY haruslah memperhatikan capaian rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan yang mengacu pada APBD tahun berjalan dan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya. Pencapaian rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY juga harus memperhatikan sasaran dan target program kegiatan yang telah disusun dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat tercapai.

Review hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah memuat sasaran strategis dan indikator sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dengan melakukan pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja. Laporan kinerja ini juga merupakan wujud akuntabilitas dan pertanggung jawaban kinerja Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berhasil atau tidaknya rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dapat dilihat dari pencapaian hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu. Berikut ini disajikan Evaluasi hasil Pelaksanaan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tahun 2020:

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ME TA INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2019	TAHUN 2020				TARGET AKHIR RPJMD
						TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	<u>Indikator:</u> Jumlah Lulusan Pelatihan Yang Ditempatkan <u>Meta Indikator:</u> Jumlah Lulusan Pelatihan Yang ditempatkan sampai dengan tahun n	Orang	524	106,19	1575	1584	100,57	Sangat Baik	2625
2	Terwujudnya Kesempatan Kerja	<u>Indikator:</u> Jumlah Kesempatan Kerja <u>Meta Indikator:</u> Jumlah Kesempatan Kerja Tahun n	Orang	1.906.046	105,66	2.061.962	2.126.316	103,12	Sangat Baik	2.149.001
3	Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Kondusif Untuk Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja	<u>Indikator:</u> Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial <u>Meta Indikator:</u> Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial sampai dengan tahun n	Kasus	10	110,00	30	43	143,33	Sangat Baik	50

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja

Tolok ukur capaian sasaran **meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja** diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut

Tabel 2.2 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	jumlah pelatihan yang ditempatkan sampai dengan tahun n

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja dengan indikator jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	1115	1575	1584	$(1584/1575 \times 100\%) = 100,57\%$	2625	60,34%

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- Tercapai dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100,57% (terlampaui).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 106,19%, terdapat penurunan sebesar 5,62 %.

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Prosentase peningkatan capaian tersebut didukung dari :

- Adanya pandemi covid-19 banyak tenaga kerja terdampak membutuhkan pelatihan
- Mengoptimalkan lulusan pelatihan dan pemagangan tahun sebelumnya untuk ditempatkan. Kegiatan pelatihan selain APBD tetap berjalan

Capaian realisasi indikator jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan pada tahun 2020 ini masuk kategori sangat baik yaitu sebesar 100,57%.

Berdasarkan dokumen Renstra TA 2017-2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, indikator jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan pada tahun 2020

ditargetkan mencapai 1575 orang dengan realisasi hingga 2020 sebanyak 1584 orang. Apabila capaian 2020 dibandingkan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022 maka capaiannya sebesar 60,34%.

Dibandingkan capaian tahun 2019 sebanyak 1115 orang, maka tahun 2020 ini mengalami kenaikan sebanyak 469 orang.

Hambatan yang dihadapi untuk mewujudkan indikator ini adalah rendahnya minat lulusan pelatihan bekerja keluar DIY baik dalam negeri maupun luar negeri.

Solusi yang bisa dilakukan dengan pemberian motivasi untuk menumbuhkan minat bekerja keluar DIY pada saat proses pelatihan.

2.1.2 Sasaran Terwujudnya Kesempatan Kerja

Tolok ukur capaian sasaran **terwujudnya kesempatan kerja** diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: Jumlah kesempatan kerja. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
	Terwujudnya kesempatan kerja	Jumlah kesempatan kerja	jumlah kesempatan kerja yang tercipta sampai dengan tahun n

Kinerja sasaran terwujudnya kesempatan kerja dengan indikator jumlah kesempatan kerja pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Kesempatan Kerja	105,66	2.061.962	2.126.316	103,12% (2.126.316/2.061.962x100%)	2.149.001	98,94

Analisis Ketercapaian Sasaran 2: Terwujudnya kesempatan kerja adalah sebagai berikut:

- Tercapai dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 103,12% (terlampai).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 105,66%, terdapat penurunan sebesar 2,54 %.

- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Prosentase peningkatan capaian tersebut didukung dari :

- Masih banyak perusahaan yang melakukan operasional di masa pandemi covid-19 meskipun dengan system pengurangan jam kerja
- Kebijakan pemulihan ekonomi dengan sasaran tenaga kerja terdampak covid-19
- Banyak tenaga kerja terdampak covid berminat mengikuti pelatihan kewirausahaan. Program pemulihan ekonomi melalui anggaran BTT di arahkan untuk pembentukan wirausaha baru sehingga pekerja terdampak dapat beralih bekerja di sektor informal.

Capaian realisasi indikator pada sasaran terwujudnya kesempatan kerja yaitu Jumlah Kesempatan Kerja pada tahun 2020 ini sebesar 103,12% sehingga masuk kategori hijau tua atau sangat baik.

Indikator ini apabila dibandingkan dengan tahun 2019, terjadi penurunan capaian. Pada tahun 2018 capaian realisasi sebesar 105,66% sedangkan pada tahun 2020 ini capaiannya 103,12%.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator Jumlah Kesempatan kerja ini adalah masih banyaknya Angkatan Kerja berpendidikan rendah (SLTP kebawah) dan masih adanya kesempatan kerja yang tidak bisa terisi karena tidak sesuai kompetensi pencari kerja dengan dunia industri.

Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas Angkatan Kerja melalui pelatihan, pemagangan dan uji kompetensi.

2.1.3 Sasaran Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Kondusif Untuk Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja

Tolok ukur capaian sasaran **terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja** diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
	terwujudnya hubungan industrial yang kondusif	Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan	Jumlah kasus yang diselesaikan diluar

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
	untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja	hubungan industrial	pengadilan hubungan industrial sampai dengan tahun n

Kinerja sasaran terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan indikator Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial	22	30	43	143,33 (43/30)x 100%	50	86,00

Analisis Ketercapaian Sasaran 3: terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja adalah sebagai berikut:

- Tercapai dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 143,33% (terlampai).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 110%, terdapat peningkatan sebesar 23,33 %.
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Prosentase peningkatan capaian tersebut didukung dari :

- Pandemi covid-19 banyak kasus ketenagakerjaan yang didaftarkan ke Disnakertrans. Peningkatan kasus ketenagakerjaan yang marak diselesaikan secara luring dan daring sehingga mempercepat penyelesaian kasus-kasus yang masuk.

Capaian realisasi indikator pada sasaran terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja

yaitu Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial pada tahun 2020 ini sebesar 143,33% sehingga masuk kategori hijau tua atau sangat baik. Berdasarkan dokumen Renstra TA 2017-2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, indikator Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 30 kasus dan bisa terealisasi sebesar 43 kasus.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial ini adalah belum optimalnya peran Lembaga Kerja Sama Bipartit (Pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh) sehingga banyak kasus tidak bias dicapai kesepakatan ditingkat Bipartit dan salah satu atau kedua pihak yang bersengketa mencatatkan/mengadukan kasusnya ke dinas yang membidangi Ketenagakerjaan untuk dilakukan upaya mediasi.

Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan sosialisasi dan pembinaan hubungan industrial ke perusahaan serta peningkatan kapasitas perangkat LKS Bipartit serta optimalisasi Tim Deteksi Dini dalam melakukan pendampingan ke perusahaan-perusahaan sehingga Hubungan Industrial dapat dijalankan dengan baik.

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tahun 2020 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2020

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	1.1 Program Pembinaan Pelatihan Standarisasi dan Pemagangan	1.112.282.000	208.880.500	(903.401.500)
	1.1.1 Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	530.195.000	115.595.000	(414.600.000)
	1.1.2 Pemagangan Tenaga Kerja	540.524.000	71.324.000	(469.200.000)
	1.1.3 Pelatihan dan Standarisasi Lembaga Pelatihan	41.563.000	21.961.500	(19.801.500)
	1.2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.539.762.000	114.268.000	(6.425.000.494.000)
	1.2.1 Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	5.389.673.000	19.156.000	(5.370.517.000,00)
	1.2.2 Pelatihan Tenaga Kerja Profesional	1.014.204.000	37.507.000	(976.697.000,00)

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.2.3 Pengukuran Produktivitas Kerja dan Pemasaran Lulusan Pelatihan	135.885.000	57.605.000	(78.280.000,00)
2.Terwujudnya Kesempatan Kerja	Program Penempatan,Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	2.772.618.000	1.750.808.000	(1.021.810.000)
	Penempatan Tenaga kerja	228.850.000	145.870.000	(82.980.000,00)
	Penyediaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja	302.220.000	19.540.000	(282.680.000,00)
	Pembentukan Kesempatan Kerja	508.880.000	1.504.930.000	996.050.000,00
	Pembentukan Usaha Mandiri bagi Tenaga Kerja Khusus	405.080.000	0	(405.080.000,00)
	Pemantauan Lembaga Penempatan	57.920.000	17.410.000	(40.510.000,00)
	Penyelenggaraan Transmigrasi	845.565.000	11.000.000	(834.565.000,00)
	Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	424.103.000	52.058.000	(372.045.000,00)
3.Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Kondusif Untuk Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan pekerja	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	815.636.000	321.611.000	(494.025.000)
	Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	377.000.000	199.460.000	(177.540.000,00)
	Penanganan Permaalahan dan Pemantauan Hubungan Industrial	438.636.000	122.151.000	(316.485.000,00)
	Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	540.600.000	335.833.000	(204.767.000)
	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	360.600.000	184.738.000	(175.862.000,00)
	Pengawasan Norma Kerja	180.000.000	151.095.000	(28.905.000,00)
	Program Pengujian Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja	800.831.000	656.778.500	(144.052.500)
	Pengujian Lingkungan Kerja	410.200.000	345.810.000	(64.390.000,00)
	Pemeriksaan Kesehatan	390.631.000	310.968.500	(79.662.500,00)

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Kerja, Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja			
	TOTAL ANGGARAN	12.581.759.000	3.388.179.000	9.193.580.000

Tabel 2.9 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	1. Program Administrasi Perkantoran	4.203.924.520	3.847.805.620	(356.118.900)
	1.1. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.853.206.000	1.809.222.000	(43.984.000,00)
	1.2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.589.697.520	1.589.697.520	0,00
	1.3. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	761.021.000	448.886.100	(312.134.900,00)
2.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.425.744.000	2.819.517.350	(2.606.226.650)
	1.1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	2.000.644.000	703.599.000	(1.297.045.000,00)
	1.2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.183.149.000	949.504.350	(1.233.644.650,00)
	1.3. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	821.917.000	731.705.000	(90.212.000,00)
3.	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	282.185.000	282.185.000	0
	1.1. Pengembangan I S O	277.185.000	277.185.000	0
	1.2. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka	5.000.000	5.000.000	0
	1.3. Kredit Jabatan Fungsional Tertentu			
4.	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	554.795.000	284.085.000	(270.710.000)
	4.1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	15.375.000	15.375.000	0
	4.2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	29.640.000	28.400.000	(1.240.000,00)
	4.3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	440.780.000	198.460.000	(242.320.000,00)
	4.4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	69.000.000	41.850.000	(27.150.000,00)
	Total Anggaran Pendukung	10.466.648.520	7.233.592.970	(3.233.055.550)

Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga Rp 2.963.629.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemberian Bantuan Peralatan Usaha kepada Tenaga Kerja Dampak Covid-19	80,360,000
2	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan Baju APD sebanyak 3.000 buah	260,100,000
3	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan Sepatu APD sebanyak 3.000 buah	149,100,000
4	Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Debarkasi ke DIY	69,000,000
5	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan Faceshield APD sebanyak 5.000 buah	375,000,000
6	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan masker kain 2 lapis sebanyak 10.200 buah	106,500,000
7	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan Kantong Mayat sebanyak 100 buah	35,500,000
8	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan Baju APD sebanyak 3.000 buah	260,100,000
9	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan Sepatu APD sebanyak 3.000 buah	149,100,000
10	Pemberian Kerja Darurat Istimewa Bagi Komunitas Pasar Tradisional untuk 600 orang	507,600,000
11	Pemberian Kerja Darurat Istimewa bagi Komunitas Pasar Tradisional	514,800,000
12	Persiapan Pembukaan TKM	58,708,500
13	Pendampingan Pelaksanaan SOP New Normal bagi Perusahaan	24,716,000
14	Pembinaan dan Penyelesaian Hubungan Industrial Tenaga Kerja Dampak Covid 19	36,507,000
15	Sarana Prasarana Pelayanan Terpadu Ketenagakerjaan	141,781,000
16	Pembekalan Kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	105,648,000
17	Pendampingan Pelaksanaan SOP New Normal bagi Perusahaan	20,350,000
18	Pembinaan dan Penyelesaian Hubungan Industrial Tenaga Kerja Dampak Covid 19	26,825,000

No	Kegiatan	Anggaran
19	Pembekalan Kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	41,934,000
	JUMLAH	2,963,629,500

Serta mengelola anggaran dekonsentrasi Rp5.378.469.000,00 ,untuk Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Rp4.313.733.000,00, Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Rp474.198.000,00, Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Rp590.538.000,00.

Tabel 2.10 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Catatan: Penyajian pada tabel ini hanya pada level program, untuk level kegiatan ada di lampiran

Sasaran OPD/Program OPD	Indikator Sasaran OPD/Indikator Program OPD	2018		2019		2020			2021			2022
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Perkiraan Realisasi	Perkiraan % Capaian	Target
Sasaran OPD 1: Terwujudnya kesempatan kerja	Jumlah Kesempatan Kerja	1.980.354		2.020.452		2.061.962.			2.104.824			2.149.001
Program Pendukung Sasaran 1: Program sesuai RPJMD: Program Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, Sesuai Permendagri 90 th 2019 menjadi: Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran	6.058 orang		10.665 orang		10.790 orang			10.915 orang			11.040 orang
Sasaran OPD 2: Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Kondusif Untuk Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Kasus yang diselesaikan diluar Pengadilan Hubungan Industrial	10 kasus		20 kasus		30 kasus			40 kasus			50 kasus
Program Pendukung Sasaran 2: Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan, Sesuai Permendagri 90 th 2019 menjadi: Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja	60 persen		61 persen		62 persen			63 persen			64 persen
Program Pendukung Sasaran 2: Program Pembinaan Hubungan Industrial, sesuai Permendagri 90	Meningkatnya jumlah perusahaan	1288 perusahaan		1388 perusahaan		1488 perusahaan			1588 perusahaan			1688 perusahaan

Sasaran OPD/Program OPD	Indikator Sasaran OPD/Indikator Program OPD	2018		2019		2020			2021			2022
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Perkiraan Realisasi	Perkiraan % Capaian	Target
th 2019 menjadi Program Hubungan Industrial	yang melaksanakan sarana HUBungan Industrial dan Jaminan Sosial											
Program Pendukung Sasaran 2: Program Pengujian Lingkungan Kerja, Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Pelatihan Hiperkes dan KK, sesuai Permendagri 90 th 2019 menjadi Program Pengawasan Ketenagakerjaan	LMeningkatnya jumlah perusahaan yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar	353 perusahaan		398 perusahaan		443 perusahaan			488 perusahaan			533 perusahaan
Sasaran OPD 3: Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	524 orang		1050 orang		1575 orang			2100 orang			2625 orang
Program Pendukung Sasaran 3: Program Pembinaan, Pelatihan, Standarisasi dan Pemagangan, Sesuai Permendari 90 th 2019 menjadi Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang lulus sertifikasi	350 orang		375 orang		400 orang			425 orang			450 orang
	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Yang Terstandarisasi	72 lembaga		77 lembaga		82 lembaga			87 lembaga			90 lembaga
Program Pendukung sasaran 3: Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Jumlah Lulusan Pelatihan Yang terampil	1.9 persen		3.81 persen		5.71 persen			7,61 persen			9.52 persen

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	Indikator						Realisasi Capaian			Proyeksi	
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah Kesempatan Kerja	1.980.354	2.020.452	2.061.962	2.104.824	2.149.001	106.97	105.66	103,12	100%	100%
2	Jumlah Kasus Yang diselesaikan diluar pengadilan Hubungan Industrial	10	20	30	40	50	100	110	143,33	100%	100%
3	Jumlah Lulusan pelatihan yang ditempatkan	524	1050	1575	2100	2625	102.86	106.19	100,57	100%	100%

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu factor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

a. Isu-Isu Strategis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia umumnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dalam ketenagakerjaan adalah semakin tingginya penganggur terbuka dan setengah penganggur. Tambahan kesempatan kerja baru yang tidak sebanyak tambahan angkatan kerja (AK) baru mengakibatkan jumlah penganggur terbuka semakin besar jumlahnya. Pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Seandainya masalah pengangguran ini berlanjut terus tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap proses pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Masalah ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian lebih saat ini yaitu besarnya angka pengangguran terdidik. Yang dimaksud dengan pengangguran terdidik adalah mereka yang mempunyai kualifikasi lulusan pendidikan yang cukup namun masih belum memiliki pekerjaan. Mereka ini sebetulnya memiliki latar belakang pendidikan yang cukup, namun tidak terserap oleh pasar kerja. Yang memprihatinkan pula, jumlah pengangguran terdidik dari tahun ke tahun tetap tinggi.

Untuk mengatasi masalah pengangguran yang semakin banyak dan kompleks diperlukan berbagai upaya dari berbagai pihak terkait termasuk pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Ada banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran diantaranya adalah meningkatkan penciptaan kesempatan kerja, merumuskan strategi dan arah kebijakan ketenagakerjaan yang tepat, menyusun perangkat peraturan ketenagakerjaan yang memadai dan lain-lain.

Upaya yang dilakukan dalam rangka penanganan pengangguran ini antara lain dengan pelatihan kewirausahaan. Mengurangi pengangguran pada umumnya, dan pengangguran terdidik pada khususnya, mengingatkan kita pada harapan akan tumbuhnya entrepreneurship atau kewirausahaan sebagai langkah untuk pemberdayaan angkatan kerja, menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain. Adapun program-program yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dalam mengatasi masalah pengangguran ini antara lain Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pembinaan pelatihan, Standarisasi dan Pemagangan dan Program Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi.

B. Isu-Isu Strategis Kondisi Hubungan Industrial

Pemahaman dan pelaksanaan Hubungan Industrial yang mantap dan dinamis dalam rangka mensejahterakan karyawan di perusahaan masih belum sepenuhnya dilaksanakan baik oleh pengusaha maupun karyawan sehingga masih sering kita jumpai adanya masalah-masalah perselisihan ketenagakerjaan di Perusahaan yang berakibat fatal yaitu terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Sehubungan dengan itu perlu adanya pembinaan-pembinaan rutin dan berkelanjutan baik terhadap karyawan dan pengusaha serta peningkatan kinerja pegawai pengawas ketenagakerjaan baik ditingkat Pemda maupun di tingkat Kabupaten/kota dan pegawai perantara pada tingkat kabupaten/kota. Adapun Program yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY terkait permasalahan hubungan Industrial ini adalah melalui Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan dan Program Pengujian Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja.

C. Isu-Isu Strategis Kondisi Ketransmigrasian

Program transmigrasi di Indonesia yang telah berlangsung, merupakan sebuah perjalanan panjang yang telah terbukti mampu meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia yang tinggal di negara kepulauan dengan masyarakat yang heterogen. Tujuan pembangunan transmigrasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan daerah, sekaligus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui transmigrasi, pemerataan keadilan kemudian kesejahteraan bisa merata. Melalui program transmigrasi pengangguran dapat diatasi, pertumbuhan ekonomi dan sumber-sumber dan atau titik-titik pertumbuhan baru ekonomi bisa dilaksanakan.

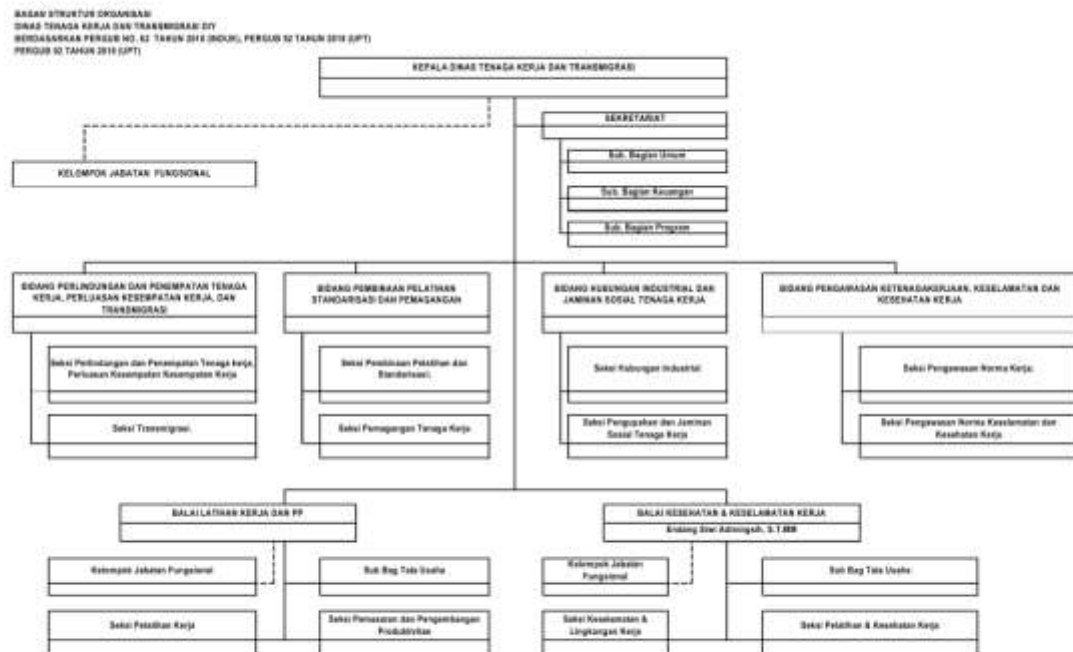
Pembangunan pedesaan melalui pembangunan pemukiman transmigrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan wilayah sebagai peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, upaya mentransformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier serta pemberdayaan masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal dan daerah melalui pembangunan kawasan transmigrasi sebagai upaya mengintegrasikan dan mempercepat terbentuknya kawasan perkotaan baru.

Permasalahan Ketransmigrasian yang masih sering dijumpai di lapangan antara lain:

- a. Lahan yang diberikan kepada transmigran kadang tidak sesuai dengan Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) yang telah dibuat sehingga menimbulkan masalah misalnya lokasi yang kurang layak maupun sengketa kepemilikan lahan

b. Penyiapan Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) dan Sarana Air Bersih (SAB) di daerah tujuan, penyiapan calon transmigran di daerah asal dan terbitnya Surat Pemberitahuan Penempatan (SPP) dari Pemerintah Pusat, tata kala waktunya dalam tahun yang sama sehingga banyak kendala dalam pelaksanaannya

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah



Penjelasan Bagan:

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY terdiri dari:

- Kepala Dinas;
- Sekretariat, terdiri atas:
 - Subbagian Program;
 - Subbagian Keuangan ; dan
 - Subbagian Umum .
- Bidang Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja , Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi , terdiri atas:

1. Seksi Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ;dan
2. Seksi Transmigrasi
- d. Bidang Pembinaan, Pelatihan , Standardisasi, dan Pemagangan, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan ,Pelatihan, dan Standardisasi ; dan
 2. Seksi Pemagangan Tenaga Kerja.
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas:
 1. Seksi Hubungan Industrial; dan
 2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan ,Keselamatan dan Kesehatan Kerja, terdiri atas:
 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja; dan
 2. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- g. unit pelaksana teknis; dan
- h. jabatan fungsional.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur No 92 Tahun 2018 Tentang Pembentukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibentuk UPT pada Dinas yang terdiri atas:

- a. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas; dan
- b. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja .

Adapun struktur organisasi pada UPT Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi DIY yaitu:

- a. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas terdiri dari:
 1. Kepala Balai;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelatihan Kerja;
 4. Seksi Pemasaran dan Pengembangan Produktivitas; dan
 5. Jabatan Fungsional
- b. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri dari:
 1. Kepala Balai;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelatihan dan Kesehatan Kerja;

4. Seksi Keselamatan dan Lingkungan Kerja; dan
5. Jabatan Fungsional

2.4 Review terhadap RKPD

RKPD merupakan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rumusan usulan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD adalah suatu tahapan yang digunakan bagi Perangkat Daerah untuk memuat kebutuhan rencana kerja yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya. Tahapan penyusunan rencana kerja ini melalui proses penyandingan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penjelasan mengenai analisa kebutuhan rencana kerja perangkat daerah tersebut dilakukan bilamana adanya temuan-temuan rencana kerja perangkat daerah yang tidak sesuai dengan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

Tabel 2-1 Review Terhadap RKPD tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Unit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								31,599,909,185	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								28,950,764,685	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								186,081,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja	2.Renja 3.Renja Perubahan 4.ROPK	Dukungan terhadap capaian indikator persentase peningkatan		100%	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100 persen	76,751,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	dan keuangan	Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku:1.Renstra	pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan			1 dokumen			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	2.DPA Tahun 2023 3.RKA Perubahan Tahun 2022 4.DPPA Tahun 2022 Tersusunnya dokumen penganggaran sesuai dengan kaidah yang berlaku:1. RKA Tahun 2023	Dukungan terhadap capaian indikator persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan		100%	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100 persen	51,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	2.Konsep/Bahan LKPJ 3.Konsep/Bahan LPPD Tersusunnya laporan evaluasi kinerja:1.Dokumen LKJIP dengan nilai AKIP 85.00	Dukungan terhadap capaian indikator persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan		100%	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100 persen	58,330,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								25,070,644,460	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN	Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan		100%	1 Tahun	100 persen	24,990,884,460	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	capaian kinerja dan keuangan		pengembangan sistem laporan kinerja dan keuangan						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan pengembangan sistem laporan kinerja dan keuangan		100%	1 Tahun	100 persen	44,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan Keuangan sesuai dengan relaisasi penggunaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi (Laporan Keuangan Tahunan)	Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan pengembangan sistem laporan kinerja dan keuangan		100%	1 dokumen	100 persen	10,579,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan Keuangan Bulanan Laporan Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Triwulanan	Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan pengembangan sistem laporan kinerja dan keuangan		100%	12 dokumen 2 dokumen 4 dokumen	100 persen	24,421,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								30,800,000	

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarkan PBB Gedung Rusunawa Ledok Code,Rusunawa Gemawang,BIK dan BIP	Dukungan terhadap capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran		100%	4 unit	100 persen	11,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai ketentuan yang berlaku	Dukungan terhadap capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran		100%	1 tahun	100 persen	19,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								15,682,000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terfasilitasinya penilaian Angka Kredit bagi JFT (Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator, Pengantar Kerja, Instruktur dan Penguji K3)	Dukungan terhadap capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran		100%	1 Tahun	100 persen	15,682,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Administrasi Umum Perangkat Daerah								372,833,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Penerangan Fasum Rusunawa (Lampu) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik:1.Tersedianya Komponen Instalasi listrik	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100%	50 buah 9 jenis	100 persen	22,878,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Peralatan dan	Persentase	2.Pelengkapan arsip	Dukungan		100%	5 jenis	100	52,663,000	PENDAPATAN

Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: 1.Alat Tulis Kantor	terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			26 jenis	persen		ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100%	10 jenis	100 persen	9,711,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Pengisian Tabung GasLPG 3.Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 4.BBM Operasional genset 5.Bendera Tersedianya logistik kantor:1.Makan dan Minum Pelayanan Publik	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100%	6 tabung 5 tabung 181 liter 3 buah 2 jenis	100 persen	6,195,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Penggandaan 3.Penjilidan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan :1.Barang cetak	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100%	28656 lembar 60 buah 3 jenis	100 persen	25,382,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Langganan surat kabar	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100%	2 jenis	100 persen	8,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi 2.Tersedianya makanan dan minuman rapat 3.Terkelolanya arsip dinas	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100%	1 tahun 1 tahun 1 tahun	100 persen	247,964,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								645,376,000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya:1.Genset	Dukungan terhadap capaian program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi		100%	1 paket	100 persen	645,376,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,803,340,725	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Surat Keluar 3.Pengiriman Dokumen Tersedianya Jasa Surat Menyurat: 1.Surat Masuk	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	100 persen	13,263,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Pembayaran tagihan rekening listrik 3.Pembayaran tagihan rekening telepon	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan		100%	1 Tahun 1 Tahun	100 persen	566,500,328	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

		Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik: 1.Pembayaran Langganan virtual meeting	daerah provinsi			1 tahun			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Pembayaran jasa kebersihan 3.Pembayaran Keamanan Kantor 4.Surveilence ISO Tersedianya jasa pelayanan umum kantor: 1.Pembayaran jasa retribusi sampah	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	1 Tahun 18 orang 3 sertifikat 12 bulan	100 persen	1,223,577,397	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								826,007,500	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Terpeliharanya kendaraan kepala dinas roda 4 2.Terbayarkannya pajak kendaraan kepala dinas roda 4	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	1 unit 1 unit	100 persen	31,151,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi	1.Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 operasional atau lapangan	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program		100%	30 unit	100 persen	453,631,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Perkantoran	2.Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 operasional atau lapangan 3.Terbayarkannya pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan 4.Terbayarkannya biaya perizinan (KIR) kendaraan dinas operasional/lapangan	penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			11 unit			
						41 unit			
						1 unit			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.LCD Proyektor 3.Kulkas 4.Alat Audio 5.Kamera 6.Laptop 7.Komputer 8.Printer Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya: 1.Mesin Ketik	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	11 unit 5 unit 30 unit 6 unit 20 unit 35 set 20 unit 15 unit	100 persen	46,025,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.Pemeliharaan rusunawa ledok code 5.Pemeliharaan perpustakaan	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang		100%	5 jenis 1 jenis	100 persen	253,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

		.Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya:1.Pemeliharaan gedung disnakertrans	urusan pemerintahan daerah provinsi			2 jenis			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Pemeliharaan CCTV 3.Pemeliharaan AC 4.Pemeliharaan Wireless/Microphone/Soundsystem Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya:1.Perawatan Pompa air	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	16 unit 42 unit 9 unit 12 kali	100 persen	41,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								200,940,000	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								200,940,000	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Penyusunan dokumen data ketenagakerjaan Penyusunan dokumen Perencanaan Tenaga Kerja DAerah	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran		11040 orang	1 dokumen 1 dokumen	100 persen	200,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								512,314,000	
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi								484,195,000	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	Pemagangan perusahaan bagi pencari kerja	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah		450 Orang	30 orang	300 orang	484,195,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Klaster Kompetensi		Sertifikasi Uji Kompetensi	tenaga kerja yang lulus sertifikasi			140 orang			
		Sosialisasi Magang Jepang				100 orang			
		Sosialisasi Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja				210 orang			
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja								28,119,000	
Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	Bimtek Akreditasi LPK	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah lembaga pelatihan kerja yang terstandarisasi		450 Orang	20 lembaga	77 lembaga	28,119,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								914,795,000	
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota								509,072,000	
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan Sosialisasi bagi perusahaan pengguna TKA dan penyandang disabilitas	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigrasi		11040 orang	1 laporan 100 perusahaan	100 persen	113,863,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan	Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan		11040 orang	300 orang	100 persen	60,500,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Transmigran	Penyuluhan Penempatan Tenaga Kerja	kerja dan penempatan transmigrasn			100 orang			
Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Bimtek Petugas Bursa Kerja Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigrasn		11040 orang	30 orang 220 lembaga	100 persen	57,810,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Padat karya infrastruktur melalui BKK Pembekalan kewirausahaan bagi angkatan kerja khusus	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigrasn		11040 orang	222 lokasi 20 orang	100 persen	276,898,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								39,411,000	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Pemutakhiran (Updating) Informasi Pasar Kerja	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran		11040 orang	12 bulan	100 persen	39,411,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi								366,312,000	

Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Pembinaan Pencegahan PMI Unprosedural	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran		11040 orang	10 lembaga	100 persen	44,564,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Pembekalan Kewirausahaan Purna PMI	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran		11040 orang	25 orang	100 persen	321,748,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								592,636,500	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota								94,786,000	
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Verifikasi Serikat Pekerja/Buruh	Dukungan terhadap capaian kinerja Jumlah perusahaan yang melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial		1688 perusahaan	200 PUK	100 persen	94,786,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi								280,065,500	
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana	Bimtek Pembinaan Hubungan Industrial (HI) Bagi Siswa SMK	Dukungan terhadap capaian kinerja Jumlah perusahaan yang melaksanakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	1688 perusahaan	540 siswa	100 persen	212,900,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan	Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Kelurahan		120 orang			
		Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama				120 orang			
		Bimtek Teknik Negosiasi				120 orang			
		Pemantauan perusahaan yang melaksanakan sarana HI				400 perusahaan			
		Peningkatan Pelayanan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				5 anjuran			
		Peningkatan pemahaman penyelesaian perselisihan HI				30 orang			
		Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Syarat Kerja Bagi Pelaku HI				7 akt			
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Sidang lembaga kerjasama tripartit	Dukungan terhadap capaian kinerja Jumlah perusahaan yang melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial		1688 perusahaan	3 sidang	100 persen	54,271,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Bimtek Struktur Skala Upah	Dukungan terhadap capaian kinerja Jumlah perusahaan yang melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial		1688 perusahaan	30 orang	100 persen	12,894,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)								217,785,000	
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Koordinasi dewan Pengupahan Pemantauan THR dan Penangguhan Upah Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten Kota (UMP dan UMK) Sosialisasi THR Sosialisasi UMP	Dukungan terhadap capaian kinerja Jumlah perusahaan yang melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial		1688 perusahaan	5 kab kota 5 kab kota 2 SK 3 akt 3 akt	100 persen	104,235,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Pembinaan Kesejahteraan pekerja/buruh	Dukungan terhadap capaian kinerja Jumlah perusahaan yang melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial		1688 perusahaan	199 orang	100 persen	113,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN								428,459,000	
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan								428,459,000	
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan besar dan menengah yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar	Bimtek HIV/AIDS/NAPZA	Dukungan terhadap capaian kinerja perusahaan nihil kecelakaan kerja	533 perusahaan	1 akt	100 persen	428,459,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Bimtek Norma Kerja			1 akt				
		Bimtek Norma Kerja Perempuan Anak			1 akt				
		Bimtek P3K			1 akt				
		Bimtek Petugas Peran Kebakaran			1 akt				
		Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3			350 perusahaan				
		Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja			250 perusahaan				
		Sosialisasi Norma K3			6 akt				
Sosialisasi Norma Kerja	6 akt								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								7,675,000,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN								7,675,000,000	
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya								7,675,000,000	
Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	persentase nilai adat , tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan	Dukungan terhadap capaian program penyelenggaraan keistimewaan	30,86 %	303 desa	100 persen	7,675,000,000	Dana Keistimewaan DIY	

		Padat Karya Pengembangan Potensi Desa	Yogyakarta urusan kebudayaan		60 lokasi			
		Pelatihan kewirausahaan bagi angkatan kerja baru di desa mandiri budaya			400 orang			
		Pendampingan Peningkatan Produktivitas melalui budaya kerja istimewa			54 perusahaan			
		Pengembangan potensi seni budaya komunitas pekerja istimewa			24 paket			
		Penguatan potensi mandiri budaya maritim bagi angkatan kerja lulusan SMK Kelautan			80 orang			
		Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Maritim			750 orang			
		Sosialisasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja Istimewa			60 kali			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							450,599,000	

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								450,599,000	
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								450,599,000	
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Penyelenggaraan Transmigrasi	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran		11040 orang	30 KK	100 persen	450,599,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
								39,725,508,185	

Unit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.9.02.02.0001 BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								15,677,465,805	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								5,419,043,405	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,878,764,432	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN dan Non-ASN	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	1 Tahun	100 persen	3,848,224,432	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	1 Tahun	100 persen	30,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								13,200,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	Dukungan terhadap capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran		100%	1 Tahun	100 persen	13,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Administrasi Umum Perangkat Daerah								106,087,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	14 Jenis	100 persen	11,522,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: 1. ATK 2. Kertas dan Cover 3. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	39 Jenis 3 Jenis 2 Jenis	100 persen	19,617,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

		4. Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya				100 buku/eksemplar			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	23 Jenis	100 persen	10,823,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Bahan Logistik Kantor: Tabung Pemadam Kebakaran	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	3 tabung	100 persen	1,575,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Barang Cetak 2. Penggandaan 3. Penjilidan	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	3 Jenis 48324 lembar 55 buah	100 persen	18,810,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Langganan surat kabar harian	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	2 jenis	100 persen	5,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Terselenggaranya Konsultasi dan Koordinasi 2. Tersedianya Makan Minum Rapat	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	1 tahun 1 tahun	100 persen	38,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,219,633,273	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat: 1. Pengiriman dokumen 2. Materai 10.000	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	12 Dokumen 132 Buah	100 persen	1,752,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik: 1. Pembayaran tagihan telepon 2. Pembayaran tagihan air 3. Pembayaran tagihan listrik	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	20000 Menit 500 m3 151551 kWh	100 persen	227,998,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor: 1. Pembayaran Jasa Keamanan Kantor	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	1 tahun	100 persen	989,882,323	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

		2. Pembayaran Jasa Kebersihan				1 tahun			
		3. Pembayaran Jasa Retribusi Sampah				1 tahun			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								201,358,700	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	13 Unit 14 Unit	100 persen	122,288,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya: 1. Pemeliharaan Alat Bermesin 2. Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin 3. Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	4 jenis 4 jenis 1 jenis	100 persen	52,685,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya: 1. Pemeliharaan Gedung	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	1 Paket	100 persen	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya: 1. Perbaikan AC 2. Perawatan CCTV 3. Perawatan Pompa Air 4. Perawatan Genset	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	6 kali 5 unit 1 unit 1 unit	100 persen	11,385,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							10,258,422,400	
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi							10,175,310,400	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	Pelatihan Keterampilan Mobile Training Unit	Dukungan 100% terhadap terwujudnya jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi	450 Orang	54 Paket	100 persen	10,175,310,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah							0	

Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	Bimbingan Konsultasi Produktivitas Perusahaan	Dukungan terhadap capaian jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi		450 Orang	450 orang	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi								83,112,000	
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	Dukungan 100% terhadap terwujudnya jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi		450 Orang	300 orang	100 persen	83,112,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
								15,677,465,805	

nit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.9.02.02.0002 BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								3,942,484,065	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								3,237,929,965	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,204,127,634	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1 tahun	100 persen	2,179,047,634	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1 tahun	100 persen	25,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								9,600,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1 tahun	100 persen	9,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Administrasi Umum Perangkat Daerah								185,933,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	12 jenis	100 persen	12,455,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: 1. ATK	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	33 jenis	100 persen	16,796,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	15 jenis	100 persen	6,572,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Solar Genset 3. Pengisian tabung pemadam kebakaran 4. Pengisian tabung gas Tersediannya bahan logistik kantor: 1. Oli Genset	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1 tahun 3 kali 12 kali 1 tahun	100 persen	5,602,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Penggandaan 3. Penjilidan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan : 1. Barang cetak	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	100%	22500 lembar 50 buku 4 jenis	100 persen	12,144,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan: 1. Surat kabar	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1 tahun	100 persen	2,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan		100%	1 tahun	100 persen	130,324,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

		2. Tersedianya makanan dan minuman rapat	pemerintah daerah			1 tahun			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,000,000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya dokumen ijin lingkungan	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1 dokumen	100 persen	60,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								446,537,731	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Surat Keluar 3. Pengiriman Dokumen Tersedianya jasa surat menyurat: 1. Surat Masuk	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1 tahun 1 tahun 1 tahun	100 persen	1,864,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Pembayaran tagihan rekening listrik 3. Pembayaran tagihan rekening telepon Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: 1. Pembayaran langganan virtual meeting	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1 tahun 1 tahun 1 tahun	100 persen	121,025,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Pembayaran jasa pengelola limbah	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1 tahun	100 persen	323,647,831	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		3. Pembayaran jasa kebersihan				12 bulan			
		4. Pembayaran jasa keamanan				5 orang			
		5. Pembayaran jasa pemantauan kualitas air				1 tahun			
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor: 1. Pembayaran jasa retribusi sampah				1 tahun			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								331,731,600	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Terbayarnya pajak kendaraan (STNK) kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 2)	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	8 unit	100 persen	163,594,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		2. Terbayarnya pajak kendaraan (STNK) kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 4)				4 unit			

		3. Terbayarnya pajak kendaraan (STNK) kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 6)				1 unit			
		4. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 2)				8 unit			
		5. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 4 bensin)				3 unit			
		6. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 4 solar)				1 unit			
		7. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 6)				1 unit			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Alat laboratorium kesehatan 3. Komputer 4. Spektrofotometer Portabel	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1 paket 15 unit 1 unit	100 persen	100,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

		5. High Volume Sampler				1 unit			
		Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya: 1. Alat laboratorium				1 paket			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya : 1. Perbaikan Atap dan Plafon	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1 paket	100 persen	46,037,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Genset 3. IPAL 4. Pemantauan kualitas air IPAL Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya: 1. AC	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	2 unit 1 unit 2 kali 15 unit	100 persen	21,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN								704,554,100	
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan								704,554,100	
Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan besar dan menengah yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada perusahaan Pengujian lingkungan kerja pada perusahaan Sertifikasi Hiperkes dan KK	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah perusahaan yang memiliki kondisi lingkungan kerja sesuai standar		533 perusahaan	880 orang 140 perusahaan 150 orang	100 persen	704,554,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

		Sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja				5 angkatan			
								3,942,484,065	

**Tabel 2-2 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2022
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				
1	Kegiatan: Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi SubKegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	DIY	Pelatihan Ketrampilan Mobile Training Unit	54 paket	
II	Program Penempatan Tenaga Kerja				
1	Kegiatan: Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota SubKegiatan: Perluasan Kesempatan Kerja	DIY	Padat Karya Infrastruktur	222 lokasi	

2.5 Rumusan Kegiatan Prioritas

Unit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				
	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				512,314,000
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				484,195,000
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pemagangan perusahaan bagi pencari kerja	DIY	30 orang	484,195,000
	Sertifikasi Uji Kompetensi		140 orang	
	Sosialisasi Magang Jepang		100 orang	
	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja		210 orang	
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja				28,119,000
Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Bimtek Akreditasi LPK	DIY	20 lembaga	28,119,000
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				914,795,000
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota				509,072,000

Pelayanan Antar Kerja	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan	DIY	1 laporan	113,863,000
	Sosialisasi bagi perusahaan pengguna TKA dan penyandang disabilitas		100 perusahaan	
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja		300 orang	60,500,500
	Penyuluhan Penempatan Tenaga Kerja		100 orang	
Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Bimtek Petugas Bursa Kerja	DIY	30 orang	57,810,500
	Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan		220 lembaga	
Perluasan Kesempatan Kerja	Padat karya infrastruktur melalui BKK	DIY	222 lokasi	276,898,000
	Pembekalan kewirausahaan bagi angkatan kerja khusus		20 orang	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				39,411,000
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pemutakhiran (Updating) Informasi Pasar Kerja	DIY	12 bulan	39,411,000
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi				366,312,000
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Pembinaan Pencegahan PMI Unprosedural	DIY	10 lembaga	44,564,000
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Pembekalan Kewirausahaan Purna PMI		25 orang	321,748,000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				592,636,500
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota				94,786,000

Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Verifikasi Serikat Pekerja/Buruh	DIY	200 PUK	94,786,000
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				280,065,500
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Bimtek Pembinaan Hubungan Industrial (HI) Bagi Siswa SMK Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama Bimtek Teknik Negosiasi Pemantauan perusahaan yang melaksanakan sarana HI Peningkatan Pelayanan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Peningkatan pemahaman penyelesaian perselisihan HI Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Syarat Kerja Bagi Pelaku HI	DIY	540 siswa 120 orang 120 orang 120 orang 400 perusahaan 5 anjuran 30 orang 7 akt	212,900,500
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Sidang lembaga kerjasama tripartit	DIY	3 sidang	54,271,000
Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Bimtek Struktur Skala Upah	DIY	30 orang	12,894,000
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)				217,785,000
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Koordinasi dewan Pengupahan Pemantauan THR dan Penangguhan Upah Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten Kota (UMP dan UMK) Sosialisasi THR	DIY	5 kab kota 5 kab kota 2 SK 3 akt	104,235,000

	Sosialisasi UMP		3 akt	
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pembinaan Kesejahteraan pekerja/buruh	DIY	199 orang	113,550,000
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				428,459,000
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan				428,459,000
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Bimtek HIV/AIDS/NAPZA Bimtek Norma Kerja Bimtek Norma Kerja Perempuan Anak Bimtek P3K Bimtek Petugas Peran Kebakaran Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3 Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja Sosialisasi Norma K3 Sosialisasi Norma Kerja	DIY	1 akt 1 akt 1 akt 1 akt 1 akt 350 perusahaan 250 perusahaan 6 akt 6 akt	428,459,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				7,675,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				7,675,000,000
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				7,675,000,000
Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakarta Padat Karya Pengembangan Potensi Desa Pelatihan kewirausahaan bagi angkatan kerja baru di desa mandiri budaya Pendampingan Peningkatan Produktivitas melalui budaya kerja istimewa Pengembangan potensi seni budaya komunitas pekerja istimewa Penguatan potensi mandiri budaya maritim bagi angkatan kerja lulusan SMK Kelautan	DIY	303 desa 60 lokasi 400 orang 54 perusahaan 24 paket 80 orang	7,675,000,000

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2021

	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Maritim		750 orang	
	Sosialisasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja Istimewa		60 kali	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				450,599,000
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				450,599,000
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				450,599,000
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Penyelenggaraan Transmigrasi	DIY	30 KK	450,599,000
39,725,508,185				
Unit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.9.02.02.0001 BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				10,258,422,400
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				10,175,310,400
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Keterampilan Mobile Training Unit	DIY	54 Paket	10,175,310,400
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah				0
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Bimbingan Konsultasi Produktivitas Perusahaan	DIY	450 orang	0
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi				83,112,000
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	DIY	300 orang	83,112,000
15,677,465,805				
nit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.9.02.02.0002 BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA				
Urusan/ Bidang Urusan/				

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				704,554,100
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan				704,554,100
Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada perusahaan	DIY	880 orang	704,554,100
	Pengujian lingkungan kerja pada perusahaan		140 perusahaan	
	Sertifikasi Hiperkes dan KK		150 orang	
	Sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja		5 angkatan	
				3,942,484,065

2.6 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi

Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Disnakertrans Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihadiri pemangku kepentingan.

Dalam forum tersebut disepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah dan Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah.

Adapun notulensi hasil forum perangkat daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

No.	Nama	Usulan/Masukan	Relevansi sesuai kewenangan	Rancangan Renja 2022	Keterangan
1.	H.R. Gonang Djulianto	1.Tanggung jawab pelayanan pemerintah kepada masyarakat masih rendah.	X		
		2 Kerjasama KADIN dengan Disnakertrans terkait Pemagangan dan KVPD	V	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi, indikator Pemagangan perusahaan bagi pencari kerja, target 180 orang	

		3	Pengembangan SMK sebagai bagian dari perbaikan kemitraan untuk berorientasi pada demand driven serta link and match sesuai kebutuhan dunia usaha dan yang dibutuhkan pekerja	X		
2.	Supriharsono (DPD APINDO DIY)	1	Kegiatan dialog sosial secara berkala (Bipartit & Tripartit) untuk membangun kesadaran, kebersamaan, kesepahaman antara pekerja dan pengusaha	V	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi, indikator Sosialisasi Sarana HI	
3.	Irsat Ade Irawan (Dewan Buruh Asean)	1	Program BLT dan BSU masih tetap dilanjutkan dengan ketentuan non diskriminasi (penerima adalah seluruh buruh/pekerja termasuk yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan)	X		
		2	Mengadakan perumahan rakyat yang terjangkau bagi buruh/pekerja.	V	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, indikator Diseminasi SJSN dan rakor jamsostek, indikator Pembinaan Kesejahteraan Pekerja/Buruh	Rusunawa Ledok Code dan Rusun Gemawang
		3	SG dan PAG dapat tersinergi dalam program pengadaan perumahan bagi	X		

		Buruh/pekerja			
		4 Pengelolaan SG dan PAG sebagai lingkungan ekonomi	X		
		5 Mengusulkan program pendapatan diluar upah untuk meningkatkan pendapatan buruh misalnya melalui TKM dengan basis target diperluas yaitu anggota serikat pekerja dan diberikan modal	V	Perluasan Kesempatan Kerja, indikator Pembekalan Kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri target 50 orang	Anggota Serikat Pekerja dapat menjadi target sasaran
		6 Program beasiswa bagi anak pekerja	X		
		7 Pelatihan-pelatihan bagi pekerja	V	Pelatihan Ketrampilan Institusional	Mekanisme penentuan peserta disepakati secara bipartit dan diusulkan N-1
		8 Program pemerintah yang membantu meningkatkan kepesertaan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan	V	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, indikator Diseminasi SJSN dan rakor jamsostek	
		9 Mencabut UU Cipta Kerja dan menghentikan pembahasan RPP	X		
		10 Bantuan modal usaha melalui DAIS	X		
		11 Pembentukan posko satgas gabungan dalam usaha preventif pencegahan konflik hubungan industrial	V	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Sudah ada Tim lembaga kerjasama tripartit tingkat provinsi anggota serikat pekerja, apindo dan unsur pemerintah yang salah satu

				Provinsi	fungsinya adalah mencegah konflik HI
4	Irul (LSP Jana Dharma)	1	Belum ada mapping kebutuhan kompetensi tenaga kerja yang jelas pada semua sektor usaha.	V	Belum ada kegiatan
		2	Pembekalan pencari kerja tentang persaingan usaha berbasis teknologi	V	Pengembangan Usaha berbasis teknologi menjadi salah satu materi pelajaran yang diberikan kepada peserta pelatihan
		3	Pembangunan karakter tata nilai budaya DIY	V	Melalui Anggaran Dais 2021
		4	Lulusan SMK harus lebih adaptif pada semua sektor/bidang usaha dan dibekali softskill serta kemampuan kewirausahaan	X	
		5	Pemerintah yang pro investasi sehingga Disnaker harus lebih intensif melakukan pengawasan ke perusahaan	X	Sesuai kewenangan Pengawasan, tidak ada kewenangan terkait investasi
5	Ahmad Mustaqiem (Ketua Peradi Yogyakarta)	1	Industri jasa masih cukup dominan di DIY	X	
		2	Untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat DIY, Pemerintah Daerah DIY jangan terlalu takut terhadap	X	

		pandemi covid-19 dengan penerapan pembatasan sosial. Mohon DIY tetap terbuka untuk kegiatan sosial ekonomi.			
		3 DAIS dapat disalurkan untuk pekerja yang tidak tercover BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan supaya dapat menerima JKP.	V		Tidak sesuai peruntukannya dengan DAIS
		4 Pemerintah Daerah DIY memperhatikan nilai UMK.	V	Penetapan UMK melalui kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMKS)	
6	Ima (Yasanti)	1 Usul ada forum/pertemuan berkala yang menjembatani kolaborasi pengusaha dengan sektor informal	V	Belum ada kegiatan	
		2 Usul dilakukan pendataan tenaga kerja informal	V	Belum ada kegiatan	
		3 DAIS sebagai sarana penunjang bantuan pada pekerja (informal)	V	Belum ada kegiatan Dais dengan sasaran pekerja informal	
		4 Dokumen Perda Ketenagakerjaan untuk dapat ditindaklanjuti	V		Tahun 2021 belum ada pembahasan

7	Karel (Yayasan Satunama)	1	Usulan yang duduk dalam tim ULD termasuk para penyandang Disabilitas	V	Pelayanan Antar Kerja, indikator Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan	
		2	Penyandang disabilitas terdampak covid membutuhkan pekerjaan di sektor formal	V	Difasilitasi melalui ULD	
		3	Program Return To Work bagi penyandang disabilitas baru untuk dapat kembali bekerja	V	Belum ada kegiatan	
8	Dani Eko Wiyono (Ketua SBSI DIY)	1	Kurangnya tenaga pengawas yang berdampak pada lemahnya pengawasan pemerintah	V	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan, Sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan, Indikator Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma keselamatan dan kesehatan kerja	
		2	Pemerintah harus selalu update data pekerja terdampak	V		pendataan terakhir September 2020
		3	Kegiatan pelatihan bagi pekerja yang dapat menambah pendapatan pekerja	V		Pelatihan TKM
		4	Perbanyak pelatihan bagi pekerja yang terkontrol, tepat guna sehingga dapat diterapkan dalam pekerjaan	V	Pelatihan Ketrampilan Institusional	Mekanisme penentuan peserta disepakati secara bipartit dan diusulkan N-1

		5	Kegiatan edukasi HI bagi pekerja	V	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi ,indikator Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan ,Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama,Peningkatan pemahaman penyelesaian perselisihan HI	
		6	Ditemukan keberpihakan Pemerintah terhadap salah satu pihak	X		Tidak relevan dengan forum OPD
		7	Advokasi perselisihan HI harus lebih ditingkatkan	V	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi ,indikator Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan ,Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama,Peningkatan pemahaman penyelesaian perselisihan HI	
		8	SOP pengawasan terhadap perusahaan "nakal"	V		Tidak relevan dengan forum OPD
		9	DAIS sebagai penunjang sektor formal	V		DAIS 2021 sudah menargetkan pekerja sektor formal
		10	Pemerintah diminta membuka akses sosial, ekonomi sebesar-	X		

		besarnya tanpa rasa takut terhadap pandemi covid-19			
9	Ruswandi (KSPSI DIY)	1 BLT dan BSU tetap dilanjutkan	X		
		2 Dampak PSBB sangat memberatkan pengusaha	X		
		3 Subsidi pembayaran BPJS bagi pekerja melalui DAIS	X		Tidak sesuai peruntukannya
		4 Anggaran pada program/kegiatan HI khususnya pengawasan agar lebih ditingkatkan misal kegiatan Deteksi Dini	V	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi ,indikator Pemantauan Perusahaan yang melaksanakan sarana HI	
		5 Serikat Pekerja,bipartit,tripartit merupakan sarana Hubungan Industrial yang baik yang harus dilakukan namun kenyataan masih banyak perusahaan menggunakan PP	V	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi ,indikator Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan ,Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama,Peningkatan pemahaman penyelesaian perselisihan HI	
10	Nurul Iman (HILLSI)	1 Kondisi riil LPK di Yogyakarta ada 169 berizin 94 sudah terakreditasi	V		Fasilitasi Akreditasi LPK melalui APBN

		2	Reward pada LSP yang sudah terakreditasi dengan cara : 1. Pemberian paket pelatihan 2. Pembentukan BKK	V	Reward berupa pembentukan BKK melalui bimtek BKK	Pembelian paket pelatihan belum dilaksanakan
		3	Juknis pelatihan selama ini diakhiri dua hal yaitu uji kompetensi dan penempatan. Untuk UJK masih bisa dilaksanakan akan tetapi untuk penempatan apakah dimungkinkan untuk ditambah opsi berwirausaha	X		Penentuan juknis merupakan kewenangan pusat
		4	Pelaksanaan Rakor HILLSI	V	Survey dan Penilaian Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja, indikator Rakor HILLSI (Himpunan Lembaga Pelatihan Kerja Seluruh Indonesia)	

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang merupakan prioritas pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY antara lain tertuang dalam beberapa program yaitu :

1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan sasaran :
 - a. Terlaksanannya pelatihan berbasis kompetensi
 - b. Terlaksanannya pelatihan calon wirausaha baru
 - c. Terlaksanannya pelatihan melalui pemagangan bersertifikat kompetensi yang berbasis pengguna di dalam dan luar negeri
 - d. Meningkatnya kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan
 - e. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan perusahaan.
2. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan sasaran :
 - a. Tersedianya peluang kerja produktif di berbagai bidang usaha produktif
 - b. Terbangunnya layanan system informasi pasar kerja
3. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan dengan sasaran :
 - a. Berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
 - b. Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan / memperoleh pelatihan ketrampilan
 - c. Meningkatnya perlindungan kepada pekerja perempuan
 - d. Diterapkannya manajemen dan standarisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - e. Menurunnya jumlah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
4. Program Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi dengan sasaran :

Terwujudnya persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan transmigrasi dalam rangka pembangunan pedesaan di daerah tertinggal.

Tabel Indikator Kinerja Urusan Daerah Disnakertrans DIY

NO	Indikator Kinerja Urusan	Satuan	Target Nasional 2022	Capaian Daerah 2020	Target Daerah 2021	Target Daerah 2022	Dukungan Sub Kegiatan Berdasarkan Prioritas Daerah	Pagu Sub Kegiatan	Catatan Daerah
1	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Index	42.03				3.32.03.1.01.04-Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	732,632,000	C. Catatan Lainnya : DIY merupakan daerah asal/pengirim; dukungan kegiatan : Pemindahan dan Penempatan Transmigran sebanyak 30 KK
2	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Index	53.12				3.32.03.1.01.04-Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	732,632,000	C. Catatan Lainnya : DIY merupakan daerah asal/pengirim; dukungan kegiatan : Pemindahan dan Penempatan Transmigran sebanyak 30 KK
3	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya	Orang	1.189.550		800	1200	2.07.03.1.01.01-Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	590,768,000	A. Penjabaran Permasalahan Daerah : Peningkatan produktivitas pada tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan karena dampak covid-19 dan baru dimulai lagi pada tahun 2021 secara bertahap target kegiatan berangsur meningkat. B. Masukan terhadap Kegiatan K/L : Untuk didukung dengan dana APBN C. Catatan Lainnya : Dukungan kegiatan : target Pelatihan produktivitas kepada 800 orang

									pada tahun 2021 dan 1200 orang pada Tahun 2022
4	Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP Online	%	60	14.86	35.92	35.92	2.07.06.1.01.01- Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	710,000,000	A. Penjabaran Permasalahan Daerah : Kurangnya SDM Pengawas Ketenagakerjaan B. Masukan terhadap Kegiatan K/L : Pendidikan calon pengawas untuk diprioritaskan C. Catatan Lainnya : Dukungan kegiatan : Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3 dan Norma Kerja pada 400 Perusahaan
5	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	17.8	110	234	282	2.07.04.1.03.03-Job Fair/Bursa Kerja	333,564,000	A. Penjabaran Permasalahan Daerah : Terjadi penurunan jumlah kesempatan kerja karena dampak covid-19 B. Masukan terhadap Kegiatan K/L : Dukungan anggaran untuk penempatan dalam negeri C. Catatan Lainnya : Dukungan kegiatan : 1. Pemagangan Perusahaan Bagi Pencari Kerja (24 orang), 2. Penempatan dari

									pelatihan (60 orang), 3. Upskilling (50 orang), 4. Job Fair/Bursa Kerja (100 orang)
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	19-20	52.18	53.37	54.57	2.07.05.1.02.01- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	285,660,000	A. Penjabaran Permasalahan Daerah : Belum semua perusahaan mempunyai komitmen untuk menerapkan tata kelola kerja yang layak B. Masukan terhadap Kegiatan K/L : Untuk dapat diberikan dukungan anggaran yang bersumber dari APBN guna meningkatkan jumlah perusahaan dengan tata kelola kerja yang layak C. Catatan Lainnya : Dukungan kegiatan : 1. Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama, 2. Pemantauan Perusahaan yang melaksanakan sarana HI, 3. Peningkatan pemahaman penyelesaian perselisihan HI

7	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	Orang	12	20	280	300	2.07.03.1.01.01-Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	975,340,000	A. Penjabaran Permasalahan Daerah : Pandemi covid 19 menyebabkan kegiatan Pelatihan dan Pemagangan mengalami kendala, dari sisi anggaran dan pelaksanaannya, sehingga baru pada tahun 2021 secara bertahap target kegiatan berangsur meningkat. B. Masukan terhadap Kegiatan K/L : Pelatihan berbasis kompetensi dapat dikelola secara langsung tanpa melalui UPTP C. Catatan Lainnya : Dukungan kegiatan : 6 paket Pelatihan Institusional, 5 paket Pelatihan Upskilling
---	---	-------	----	----	-----	-----	--	-------------	--

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Th 2022 yaitu:

1. Menurunnya angka pengangguran

Adapun Sasaran Renja yaitu :

1. Terwujudnya Kesempatan Kerja
2. Terwujudnya Hubungan Industrial Yang kondusif Untuk Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja
3. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja tahun 2022 disusun berdasarkan skala prioritas yang mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran OPD, dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan maka lokasi kegiatan diprioritaskan pada daerah – daerah kantong kemiskinan. Sedangkan untuk meningkatkan daya saing maka sasaran kegiatan diperuntukkan bagi masyarakat DIY. Sehingga diharapkan kegiatan tersebut mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran.

Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Unit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
				Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						31,599,909,185				35,748,943,070
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						28,950,764,685				26,912,954,070
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						186,081,000				276,637,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	2.Renja 3.Renja Perubahan 4.ROPK Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku:1.Renstra	Dukungan terhadap capaian indikator persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	76,751,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	125,000,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja	2.DPA Tahun 2023 3.RKA Perubahan Tahun 2022 4.DPPA Tahun 2022	Dukungan terhadap capaian indikator persentase peningkatan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	51,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja	100%	61,637,000

	dan keuangan	Tersusunnya dokumen penganggaran sesuai dengan kaidah yang berlaku:1. RKA Tahun 2023	pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	1 dokumen				dan keuangan		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	2.Konsep/Bahan LKPJ 3.Konsep/Bahan LPPD Tersusunnya laporan evaluasi kinerja:1.Dokumen LKJIP dengan nilai AKIP 85.00	Dukungan terhadap capaian indikator persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	58,330,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	90,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					25,070,644,460					21,665,469,570
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN	Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan pengembangan sistem laporan kinerja dan keuangan	1 Tahun	24,990,884,460	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	21,586,129,570
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan pengembangan sistem laporan kinerja dan keuangan	1 Tahun	44,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	44,340,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan Keuangan sesuai dengan relaisasi penggunaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi (Laporan Keuangan Tahunan)	Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan pengembangan sistem laporan kinerja dan keuangan	1 dokumen	10,579,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	10,579,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan Keuangan Bulanan Laporan Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Triwulanan	Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan pengembangan sistem laporan kinerja dan keuangan	12 dokumen 2 dokumen 4 dokumen	24,421,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	24,421,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30,800,000					31,000,000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarkan PBB Gedung Rusunawa Ledok Code, Rusunawa Gemawang, BIK dan BIP	Dukungan terhadap capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran	4 unit	11,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	11,000,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai ketentuan yang berlaku	Dukungan terhadap capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	19,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	20,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					15,682,000					15,682,000

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terfasilitasinya penilaian Angka Kredit bagi JFT (Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator, Pengantar Kerja, Instruktur dan Penguji K3)	Dukungan terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	15,682,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	15,682,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah					372,833,000					623,197,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Penerangan Fasum Rusunawa (Lampu) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik: 1. Tersedianya Komponen Instalasi listrik	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	50 buah 9 jenis	22,878,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	62,501,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Perlengkapan arsip Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: 1. Alat Tulis Kantor	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	5 jenis 26 jenis	52,663,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	62,501,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	10 jenis	9,711,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	9,711,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Pengisian Tabung Gas LPG 3. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	6 tabung 5 tabung	6,195,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	6,195,000

		4.BBM Operasional genset		181 liter						
		5.Bendera		3 buah						
		Tersedianya logistik kantor:1.Makan dan Minum Pelayanan Publik		2 jenis						
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Penggandaan 3.Penjiilidan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan :1.Barang cetakan	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	28656 lembar 60 buah 3 jenis	25,382,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	25,349,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Langganan surat kabar	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	2 jenis	8,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	8,040,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi 2.Tersedianya makanan dan minuman rapat 3.Terkelolanya arsip dinas	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun 1 tahun 1 tahun	247,964,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	448,900,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					645,376,000					823,238,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya:1.Genset	Dukungan terhadap capaian program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	1 paket	645,376,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	823,238,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,803,340,725					2,005,092,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Surat Keluar 3.Pengiriman Dokumen Tersedianya Jasa Surat Menyurat: 1.Surat Masuk	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	13,263,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	13,263,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Pembayaran tagihan rekening listrik 3.Pembayaran tagihan rekening telepon Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik: 1.Pembayaran Langganan virtual meeting	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1 Tahun 1 Tahun 1 tahun	566,500,328	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	566,500,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Pembayaran jasa kebersihan 3.Pembayaran Keamanan Kantor	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program	1 Tahun 18 orang	1,223,577,397	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,425,329,000

		4.Surveilence ISO	penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	3 sertifikat						
		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor: 1.Pembayaran jasa retribusi sampah		12 bulan						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					826,007,500					1,472,638,500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Terpeliharanya kendaraan kepala dinas roda 4 2.Terbayarkannya pajak kendaraan kepala dinas roda 4	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1 unit 1 unit	31,151,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	31,197,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 operasional atau lapangan 2.Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 operasional atau lapangan 3.Terbayarkannya pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan 4.Terbayarkannya biaya perizinan (KIR) kendaraan dinas operasional/lapangan	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	30 unit 11 unit 41 unit 1 unit	453,631,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	453,596,500

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.LCD Proyektor 3.Kulkas 4.Alat Audio 5.Kamera 6.Laptop 7.Komputer 8.Printer Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya: 1.Mesin Ketik	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	11 unit 5 unit 30 unit 6 unit 20 unit 35 set 20 unit 15 unit	46,025,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	46,025,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.Pemeliharaan rusunawa ledok code 5.Pemeliharaan perpustakaan .Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya:1.Pemeliharaan gedung disnakertrans	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	5 jenis 1 jenis 2 jenis	253,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	900,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Pemeliharaan CCTV 3.Pemeliharaan AC 4.Pemeliharaan Wireless/Microphone/Soundsystem	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan	16 unit 42 unit 9 unit	41,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	41,820,000

		daerah provinsi								
		Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya:1.Perawatan Pompa air		12 kali						
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					200,940,000					345,144,000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					200,940,000					345,144,000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Penyusunan dokumen data ketenagakerjaan Penyusunan dokumen Perencanaan Tenaga Kerja DAerah	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan penempatan transmigran	1 dokumen 1 dokumen	200,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	11040 orang	345,144,000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					512,314,000					2,000,808,000
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					484,195,000					1,940,808,000
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	Pemagangan perusahaan bagi pencari kerja Sertifikasi Uji Kompetensi Sosialisasi Magang Jepang Sosialisasi Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi	30 orang 140 orang 100 orang 210 orang	484,195,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	450 Orang	1,940,808,000
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja					28,119,000					60,000,000

Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	Bimtek Akreditasi LPK	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah lembaga pelatihan kerja yang terstandarisasi	20 lembaga	28,119,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	450 Orang	60,000,000
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					914,795,000				4,125,625,000	
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota					509,072,000				3,359,225,000	
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan Sosialisasi bagi perusahaan pengguna TKA dan penyandang disabilitas	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigrasi	1 laporan 100 perusahaan	113,863,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	11040 orang	200,000,000
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja Penyuluhan Penempatan Tenaga Kerja	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigrasi	300 orang 100 orang	60,500,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	11040 orang	87,000,000
Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Bimtek Petugas Bursa Kerja Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigrasi	30 orang 220 lembaga	57,810,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	11040 orang	90,740,000

Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Padat karya infrastruktur melalui BKK Pembekalan kewirausahaan bagi angkatan kerja khusus	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigrasi	222 lokasi 20 orang	276,898,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	11040 orang	2,981,485,000
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					39,411,000					50,000,000
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Pemutakhiran (Updating) Informasi Pasar Kerja	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigrasi	12 bulan	39,411,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	11040 orang	50,000,000
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi					366,312,000					716,400,000
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Pembinaan Pencegahan PMI Unprosudural	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigrasi	10 lembaga	44,564,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	11040 orang	80,000,000
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Pembekalan Kewirausahaan Purna PMI	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigrasi	25 orang	321,748,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	11040 orang	636,400,000

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					592,636,500					1,431,237,000
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota					94,786,000					241,750,000
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Verifikasi Serikat Pekerja/Buruh	Dukungan terhadap capaian kinerja Jumlah perusahaan yang melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	200 PUK	94,786,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1688 perusahaan	241,750,000
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi					280,065,500					698,026,000
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Bimtek Pembinaan Hubungan Industrial (HI) Bagi Siswa SMK Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama Bimtek Teknik Negosiasi Pemantauan perusahaan yang melaksanakan sarana HI Peningkatan Pelayanan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Dukungan terhadap capaian kinerja Jumlah perusahaan yang melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	540 siswa 120 orang 120 orang 120 orang 400 perusahaan 5 anjuran	212,900,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1688 perusahaan	491,122,000

		Peningkatan pemahaman penyelesaian perselisihan HI		30 orang						
		Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Syarat Kerja Bagi Pelaku HI		7 akt						
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Sidang lembaga kerjasama tripartit	Dukungan terhadap capaian kinerja Jumlah perusahaan yang melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	3 sidang	54,271,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1688 perusahaan	146,904,000
Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Bimtek Struktur Skala Upah	Dukungan terhadap capaian kinerja Jumlah perusahaan yang melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	30 orang	12,894,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1688 perusahaan	60,000,000
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)					217,785,000					491,461,000
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan	Koordinasi dewan Pengupahan Pemantauan THR dan Penangguhan Upah	Dukungan terhadap capaian kinerja Jumlah perusahaan yang	5 kab kota 5 kab kota	104,235,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan	1688 perusahaan	342,922,000

	Industrial dan Jaminan Sosial	Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten Kota (UMP dan UMK)	melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	2 SK				Industrial dan Jaminan Sosial		
		Sosialisasi THR		3 akt						
		Sosialisasi UMP		3 akt						
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Pembinaan Kesejahteraan pekerja/buruh	Dukungan terhadap capaian kinerja Jumlah perusahaan yang melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	199 orang	113,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1688 perusahaan	148,539,000
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					428,459,000					933,175,000
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					428,459,000					933,175,000
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan besar dan menengah yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar	Bimtek HIV/AIDS/NAPZA Bimtek Norma Kerja Bimtek Norma Kerja Perempuan Anak Bimtek P3K Bimtek Petugas Peran Kebakaran Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3	Dukungan terhadap capaian kinerja persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja	1 akt 1 akt 1 akt 1 akt 1 akt 350 perusahaan	428,459,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perusahaan besar dan menengah yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar	533 perusahaan	933,175,000

		Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja		250 perusahaan						
		Sosialisasi Norma K3		6 akt						
		Sosialisasi Norma Kerja		6 akt						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					7,675,000,000					60,273,821,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					7,675,000,000					60,273,821,000
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya					7,675,000,000					60,273,821,000
Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	persentase nilai adat , tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakarta Padat Karya Pengembangan Potensi Desa Pelatihan kewirausahaan bagi angkatan kerja baru di desa mandiri budaya Pendampingan Peningkatan Produktivitas melalui budaya kerja istimewa Pengembangan potensi seni budaya komunitas pekerja istimewa	Dukungan terhadap capaian program penyelenggara n keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	303 desa 60 lokasi 400 orang 54 perusahaan 24 paket	7,675,000,000	Dana Keistimewaan DIY		persentase nilai adat , tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	30,86 %	60,273,821,000

		Penguatan potensi mandiri budaya maritim bagi angkatan kerja lulusan SMK Kelautan		80 orang						
		Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Maritim		750 orang						
		Sosialisasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja Istimewa		60 kali						
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					450,599,000					850,000,000
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					450,599,000					850,000,000
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					450,599,000					850,000,000
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Penyelenggaraan Transmigrasi	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran	30 KK	450,599,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	11040 orang	850,000,000
					39,725,508,185					96,872,764,070

Unit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.9.02.02.0002 BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/

				Keluaran Sub Kegiatan			9	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					15,677,465,805					13,102,452,350
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					5,419,043,405					6,358,615,500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3,878,764,432					4,434,620,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN dan Non-ASN	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1 Tahun	3,848,224,432	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	4,400,000,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1 Tahun	30,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	34,620,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					13,200,000					13,200,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	Dukungan terhadap capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	13,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	13,200,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah					106,087,000					140,710,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	14 Jenis	11,522,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	24,530,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: 1. ATK 2. Kertas dan Cover 3. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4. Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	39 Jenis 3 Jenis 2 Jenis 100 buku/eksemplar	19,617,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	25,124,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	23 Jenis	10,823,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	10,825,000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Bahan Logistik Kantor: Tabung Pemadam Kebakaran	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	3 tabung	1,575,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,476,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Barang Cetak 2. Penggandaan 3. Penjilidan	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	3 Jenis 48324 lembar 55 buah	18,810,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	20,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Langganan surat kabar harian	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	2 jenis	5,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	5,880,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Terselenggaranya Konsultasi dan Koordinasi 2. Tersedianya Makan Minum Rapat	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1 tahun 1 tahun	38,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	52,875,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,219,633,273					1,246,147,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat: 1. Pengiriman dokumen 2. Materai 10.000	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	12 Dokumen 132 Buah	1,752,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,752,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik: 1. Pembayaran tagihan telepon 2. Pembayaran tagihan air 3. Pembayaran tagihan listrik	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	20000 Menit 500 m3 151551 kWh	227,998,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	230,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor: 1. Pembayaran Jasa Keamanan Kantor 2. Pembayaran Jasa Kebersihan 3. Pembayaran Jasa Retribusi Sampah	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1 tahun 1 tahun 1 tahun	989,882,323	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,014,395,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					201,358,700					523,938,500

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	13 Unit	122,288,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	155,048,500
		2. Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		14 Unit						
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya: 1. Pemeliharaan Alat Bermesin	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	4 jenis	52,685,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	120,825,000
		2. Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin		4 jenis						
		3. Pemeliharaan Alat Rumah Tangga		1 jenis						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya: 1. Pemeliharaan Gedung	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1 Paket	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	236,680,000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya: 1. Perbaikan AC 2. Perawatan CCTV 3. Perawatan Pompa Air 4. Perawatan Genset	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	6 kali 5 unit 1 unit 1 unit	11,385,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	11,385,000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					10,258,422,400					6,743,836,850
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi					10,175,310,400					5,043,836,850
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	Pelatihan Keterampilan Mobile Training Unit	Dukungan 100% terhadap terwujudnya jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi	54 Paket	10,175,310,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	450 Orang	5,043,836,850
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah					0					300,000,000
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	Bimbingan Konsultasi Produktivitas Perusahaan	Dukungan terhadap capaian jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi	450 orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	450 Orang	300,000,000
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi					83,112,000					1,400,000,000

Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	Dukungan 100% terhadap terwujudnya jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi	300 orang	83,112,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	450 Orang	1,400,000,000
					15,677,465,805					13,102,452,350

Unit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.9.02.02.0002 BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
				Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						3,942,484,065				3,942,484,065
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						3,237,929,965				3,237,929,965
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,204,127,634				2,204,127,634
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun	2,179,047,634	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2,179,047,634
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun	25,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	25,080,000

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					9,600,000					9,600,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun	9,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	9,600,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah					185,933,000					185,933,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah	12 jenis	12,455,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	12,455,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: 1. ATK	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah	33 jenis	16,796,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	16,796,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah	15 jenis	6,572,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	6,572,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Solar Genset 3. Pengisian tabung pemadam kebakaran 4. Pengisian tabung gas	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah	1 tahun 3 kali 12 kali	5,602,000			Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	5,602,000

		Tersediannya bahan logistik kantor: 1. Oli Genset	daerah	1 tahun						
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Penggandaan 3. Penjilidan Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan : 1. Barang cetak	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah	22500 lembar 50 buku 4 jenis	12,144,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	12,144,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan: 1. Surat kabar	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun	2,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2,040,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi 2. Tersediannya makanan dan minuman rapat	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun 1 tahun	130,324,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	130,324,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					60,000,000					60,000,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersediannya dokumen ijin lingkungan	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah	1 dokumen	60,000,000			Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	60,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					446,537,731					446,537,731

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Surat Keluar 3. Pengiriman Dokumen Tersedianya jasa surat menyurat: 1. Surat Masuk	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun 1 tahun 1 tahun	1,864,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,864,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Pembayaran tagihan rekening listrik 3. Pembayaran tagihan rekening telepon Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: 1. Pembayaran langganan virtual meeting	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun 1 tahun 1 tahun	121,025,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	121,025,900
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Pembayaran jasa pengelola limbah 3. Pembayaran jasa kebersihan 4. Pembayaran jasa keamanan 5. Pembayaran jasa pemantauan kualitas air	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun 12 bulan 5 orang 1 tahun	323,647,831	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	323,647,831

		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor: 1. Pembayaran jasa retribusi sampah		1 tahun						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					331,731,600					331,731,600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Terbayarnya pajak kendaraan (STNK) kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 2)	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah	8 unit	163,594,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	163,594,000
		2. Terbayarnya pajak kendaraan (STNK) kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 4)		4 unit						
		3. Terbayarnya pajak kendaraan (STNK) kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 6)		1 unit						
		4. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 2)		8 unit						

		5. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 4 bensin)		3 unit						
		6. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 4 solar)		1 unit						
		7. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 6)		1 unit						
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Alat laboratorium kesehatan 3. Komputer 4. Spektrofotometer Portabel 5. High Volume Sampler Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya: 1. Alat laboratorium	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah	1 paket 15 unit 1 unit 1 unit 1 paket	100,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100,250,000

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2021

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya : 1. Perbaikan Atap dan Plafon	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah	1 paket	46,037,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	46,037,600
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Genset 3. IPAL 4. Pemantauan kualitas air IPAL Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya: 1. AC	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah	2 unit 1 unit 2 kali 15 unit	21,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	21,850,000
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					704,554,100					704,554,100
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					704,554,100					704,554,100
Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan besar dan menengah yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada perusahaan Pengujian lingkungan kerja pada perusahaan Sertifikasi Hiperkes dan KK Sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah perusahaan yang memiliki kondisi lingkungan kerja sesuai standar	880 orang 140 perusahaan 150 orang 5 angkatan	704,554,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perusahaan besar dan menengah yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar	533 perusahaan	704,554,100
					3,942,484,065					3,942,484,065

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun anggaran 2022, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY beserta 2 UPTD yaitu Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas serta Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja melaksanakan program dan kegiatan seperti tercantum pada tabel

Unit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			
	Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)
		Keluaran Sub Kegiatan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			31,599,909,185
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			28,950,764,685
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			186,081,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.Renja	1 dokumen	76,751,000
	3.Renja Perubahan	1 dokumen	
	4.ROPK	1 dokumen	
	Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku:1.Renstra	1 dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.DPA Tahun 2023	1 dokumen	51,000,000
	3.RKA Perubahan Tahun 2022	1 dokumen	
	4.DPPA Tahun 2022	1 dokumen	
	Tersusunnya dokumen penganggaran sesuai dengan kaidah yang berlaku:1. RKA Tahun 2023	1 dokumen	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.Konsep/Bahan LKPJ	1 dokumen	58,330,000
	3.Konsep/Bahan LPPD	1 dokumen	

	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja:1.Dokumen LKJIP dengan nilai AKIP 85.00	1 dokumen	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			25,070,644,460
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN	1 Tahun	24,990,884,460
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	1 Tahun	44,760,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan sesuai dengan relaisasi penggunaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi (Laporan Keuangan Tahunan)	1 dokumen	10,579,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan	12 dokumen	24,421,000
	Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	
	Laporan Keuangan Triwulanan	4 dokumen	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			30,800,000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terbayarkan PBB Gedung Rusunawa Ledok Code,Rusunawa Gemawang,BIK dan BIP	4 unit	11,000,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai ketentuan yang berlaku	1 tahun	19,800,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15,682,000

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terfasilitasinya penilaian Angka Kredit bagi JFT (Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator, Pengantar Kerja, Instruktur dan Penguji K3)	1 Tahun	15,682,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah			372,833,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Penerangan Fasum Rusunawa (Lampu) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik: 1. Tersedianya Komponen Instalasi listrik	50 buah 9 jenis	22,878,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2. Perlengkapan arsip Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: 1. Alat Tulis Kantor	5 jenis 26 jenis	52,663,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	10 jenis	9,711,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2. Pengisian Tabung Gas LPG 3. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 4. BBM Operasional genset 5. Bendera Tersedianya logistik kantor: 1. Makan dan Minum Pelayanan Publik	6 tabung 5 tabung 181 liter 3 buah 2 jenis	6,195,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Penggandaan 3. Penjilidan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan : 1. Barang cetakan	28656 lembar 60 buah 3 jenis	25,382,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan surat kabar	2 jenis	8,040,000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi	1 tahun	247,964,000
	2.Tersedianya makanan dan minuman rapat	1 tahun	
	3.Terkelolanya arsip dinas	1 tahun	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			645,376,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya:1.Genset	1 paket	645,376,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,803,340,725
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.Surat Keluar	1 Tahun	13,263,000
	3.Pengiriman Dokumen	1 Tahun	
	Tersedianya Jasa Surat Menyurat: 1.Surat Masuk	1 Tahun	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.Pembayaran tagihan rekening listrik	1 Tahun	566,500,328
	3.Pembayaran tagihan rekening telepon	1 Tahun	
	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik: 1.Pembayaran Langganan virtual meeting	1 tahun	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.Pembayaran jasa kebersihan	1 Tahun	1,223,577,397
	3.Pembayaran Keamanan Kantor	18 orang	
	4.Surveillance ISO	3 sertifikat	
	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor: 1.Pembayaran jasa retribusi sampah	12 bulan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			826,007,500

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.Terpeliharanya kendaraan kepala dinas roda 4	1 unit	31,151,000
	2.Terbayarkannya pajak kendaraan kepala dinas roda 4	1 unit	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 operasional atau lapangan	30 unit	453,631,500
	2.Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 operasional atau lapangan	11 unit	
	3.Terbayarkannya pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	41 unit	
	4.Terbayarkannya biaya perizinan (KIR) kendaraan dinas operasional/lapangan	1 unit	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.LCD Proyektor	11 unit	46,025,000
	3.Kulkas	5 unit	
	4.Alat Audio	30 unit	
	5.Kamera	6 unit	
	6.Laptop	20 unit	
	7.Komputer	35 set	
	8.Printer	20 unit	
	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya: 1.Mesin Ketik	15 unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.Pemeliharaan rusunawa ledok code	5 jenis	253,380,000
	5.Pemeliharaan perpustakaan	1 jenis	
	.Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya:1.Pemeliharaan gedung disnakertrans	2 jenis	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.Pemeliharaan CCTV	16 unit	41,820,000
	3.Pemeliharaan AC	42 unit	

	4. Pemeliharaan Wireless/Microphone/Soundsystem	9 unit	
	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya: 1. Perawatan Pompa air	12 kali	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			200,940,000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			200,940,000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Penyusunan dokumen data ketenagakerjaan	1 dokumen	200,940,000
	Penyusunan dokumen Perencanaan Tenaga Kerja DAerah	1 dokumen	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			512,314,000
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			484,195,000
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pemagangan perusahaan bagi pencari kerja	30 orang	484,195,000
	Sertifikasi Uji Kompetensi	140 orang	
	Sosialisasi Magang Jepang	100 orang	
	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja	210 orang	
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja			28,119,000
Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Bimtek Akreditasi LPK	20 lembaga	28,119,000
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			914,795,000
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota			509,072,000
Pelayanan Antar Kerja	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan	1 laporan	113,863,000
	Sosialisasi bagi perusahaan pengguna TKA dan penyandang disabilitas	100 perusahaan	

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	300 orang	60,500,500
	Penyuluhan Penempatan Tenaga Kerja	100 orang	
Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Bimtek Petugas Bursa Kerja	30 orang	57,810,500
	Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan	220 lembaga	
Perluasan Kesempatan Kerja	Padat karya infrastruktur melalui BKK	222 lokasi	276,898,000
	Pembekalan kewirausahaan bagi angkatan kerja khusus	20 orang	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			39,411,000
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pemutakhiran (Updating) Informasi Pasar Kerja	12 bulan	39,411,000
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi			366,312,000
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Pembinaan Pencegahan PMI Unprosedural	10 lembaga	44,564,000
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Pembekalan Kewirausahaan Purna PMI	25 orang	321,748,000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			592,636,500
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota			94,786,000
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Verifikasi Serikat Pekerja/Buruh	200 PUK	94,786,000
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			280,065,500

Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Bimtek Pembinaan Hubungan Industrial (HI) Bagi Siswa SMK	540 siswa	212,900,500
	Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan	120 orang	
	Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama	120 orang	
	Bimtek Teknik Negosiasi	120 orang	
	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan sarana HI	400 perusahaan	
	Peningkatan Pelayanan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	5 anjuran	
	Peningkatan pemahaman penyelesaian perselisihan HI	30 orang	
	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Syarat Kerja Bagi Pelaku HI	7 akt	
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Sidang lembaga kerjasama tripartit	3 sidang	54,271,000
Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Bimtek Struktur Skala Upah	30 orang	12,894,000
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)			217,785,000
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Koordinasi dewan Pengupahan	5 kab kota	104,235,000
	Pemantauan THR dan Penangguhan Upah	5 kab kota	
	Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten Kota (UMP dan UMK)	2 SK	
	Sosialisasi THR	3 akt	
	Sosialisasi UMP	3 akt	

Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pembinaan Kesejahteraan pekerja/buruh	199 orang	113,550,000
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			428,459,000
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan			428,459,000
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Bimtek HIV/AIDS/NAPZA	1 akt	428,459,000
	Bimtek Norma Kerja	1 akt	
	Bimtek Norma Kerja Perempuan Anak	1 akt	
	Bimtek P3K	1 akt	
	Bimtek Petugas Peran Kebakaran	1 akt	
	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3	350 perusahaan	
	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja	250 perusahaan	
	Sosialisasi Norma K3	6 akt	
	Sosialisasi Norma Kerja	6 akt	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			7,675,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			7,675,000,000
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			7,675,000,000
Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakarta	303 desa	7,675,000,000
	Padat Karya Pengembangan Potensi Desa	60 lokasi	
	Pelatihan kewirausahaan bagi angkatan kerja baru di desa mandiri budaya	400 orang	
	Pendampingan Peningkatan Produktivitas melalui budaya kerja istimewa	54 perusahaan	

	Pengembangan potensi seni budaya komunitas pekerja istimewa	24 paket	
	Penguatan potensi mandiri budaya maritim bagi angkatan kerja lulusan SMK Kelautan	80 orang	
	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Maritim	750 orang	
	Sosialisasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja Istimewa	60 kali	

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			450,599,000
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			450,599,000
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			450,599,000
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Penyelenggaraan Transmigrasi	30 KK	450,599,000
			39,725,508,185

Unit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.9.02.02.0002 BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)
		Keluaran Sub Kegiatan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			15,677,465,805
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			5,419,043,405
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,878,764,432
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN dan Non-ASN	1 Tahun	3,848,224,432

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	1 Tahun	30,540,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			13,200,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	1 Tahun	13,200,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah			106,087,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	14 Jenis	11,522,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: 1. ATK	39 Jenis	19,617,000
	2. Kertas dan Cover	3 Jenis	
	3. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2 Jenis	
	4. Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	100 buku/eksemplar	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	23 Jenis	10,823,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor: Tabung Pemadam Kebakaran	3 tabung	1,575,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Barang Cetakan	3 Jenis	18,810,000
	2. Penggandaan	48324 lembar	
	3. Penjilidan	55 buah	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Langganan surat kabar harian	2 jenis	5,640,000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Terselenggaranya Konsultasi dan Koordinasi	1 tahun	38,100,000
	2. Tersedianya Makan Minum Rapat	1 tahun	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,219,633,273
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat: 1. Pengiriman dokumen	12 Dokumen	1,752,000
	2. Materai 10.000	132 Buah	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik: 1. Pembayaran tagihan telepon	20000 Menit	227,998,950
	2. Pembayaran tagihan air	500 m3	
	3. Pembayaran tagihan listrik	151551 kWh	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor: 1. Pembayaran Jasa Keamanan Kantor	1 tahun	989,882,323
	2. Pembayaran Jasa Kebersihan	1 tahun	
	3. Pembayaran Jasa Retribusi Sampah	1 tahun	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			201,358,700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 Unit	122,288,700

	2. Terbayarnya Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Unit	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya: 1. Pemeliharaan Alat Bermesin 2. Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin 3. Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	4 jenis 4 jenis 1 jenis	52,685,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya: 1. Pemeliharaan Gedung	1 Paket	15,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya: 1. Perbaikan AC 2. Perawatan CCTV 3. Perawatan Pompa Air 4. Perawatan Genset	6 kali 5 unit 1 unit 1 unit	11,385,000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			10,258,422,400
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi			10,175,310,400
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Pelatihan Keterampilan Mobile Training Unit	54 Paket	10,175,310,400
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah			0
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Bimbingan Konsultasi Produktivitas Perusahaan	450 orang	0
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi			83,112,000

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2021

Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	300 orang	83,112,000
			15,677,465,805

Unit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.9.02.02.0002 BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			
	Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)
		Keluaran Sub Kegiatan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			3,942,484,065
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			3,237,929,965
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,204,127,634
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN	1 tahun	2,179,047,634
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	1 tahun	25,080,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			9,600,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 tahun	9,600,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah			185,933,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 jenis	12,455,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: 1. ATK	33 jenis	16,796,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	15 jenis	6,572,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2. Solar Genset	1 tahun	5,602,000
	3. Pengisian tabung pemadam kebakaran	3 kali	

	4. Pengisian tabung gas Tersediannya bahan logistik kantor: 1. Oli Genset	12 kali 1 tahun	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Penggandaan 3. Penjilidan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan : 1. Barang cetakan	22500 lembar 50 buku 4 jenis	12,144,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan: 1. Surat kabar	1 tahun	2,040,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi 2. Tersedianya makanan dan minuman rapat	1 tahun 1 tahun	130,324,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			60,000,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya dokumen ijin lingkungan	1 dokumen	60,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			446,537,731
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Surat Keluar 3. Pengiriman Dokumen Tersedianya jasa surat menyurat: 1. Surat Masuk	1 tahun 1 tahun 1 tahun	1,864,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Pembayaran tagihan rekening listrik 3. Pembayaran tagihan rekening telepon Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: 1. Pembayaran langganan virtual meeting	1 tahun 1 tahun 1 tahun	121,025,900

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2. Pembayaran jasa pengelola limbah	1 tahun	323,647,831
	3. Pembayaran jasa kebersihan	12 bulan	
	4. Pembayaran jasa keamanan	5 orang	
	5. Pembayaran jasa pemantauan kualitas air	1 tahun	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor: 1. Pembayaran jasa retribusi sampah	1 tahun	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			331,731,600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Terbayarnya pajak kendaraan (STNK) kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 2)	8 unit	163,594,000
	2. Terbayarnya pajak kendaraan (STNK) kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 4)	4 unit	
	3. Terbayarnya pajak kendaraan (STNK) kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 6)	1 unit	
	4. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 2)	8 unit	
	5. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 4 bensin)	3 unit	

	6. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 4 solar)	1 unit	
	7. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 6)	1 unit	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2. Alat laboratorium kesehatan 3. Komputer 4. Spektrofotometer Portabel 5. High Volume Sampler Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya: 1. Alat laboratorium	1 paket 15 unit 1 unit 1 unit 1 paket	100,250,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya : 1. Perbaikan Atap dan Plafon	1 paket	46,037,600
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2. Genset 3. IPAL 4. Pemantauan kualitas air IPAL Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya: 1. AC	2 unit 1 unit 2 kali 15 unit	21,850,000
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			704,554,100
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan			704,554,100
Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada perusahaan Pengujian lingkungan kerja pada perusahaan Sertifikasi Hiperkes dan KK	880 orang 140 perusahaan 150 orang	704,554,100

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2021

	Sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja	5 angkatan	
			3,942,484,065

BAB 5 PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tahun 2022 merupakan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk satu tahun kedepan. Rencana Kerja ini adalah salah satu pedoman yang akan dipakai dalam mewujudkan Tujuan Disnakertrans DIY.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini harus tunduk kepada kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan diperlukan peran serta secara aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), masyarakat dan penyelenggara pemerintah terutama segenap aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Diperlukan rencana tindak lanjut untuk mengimplementasikan isu-isu strategis yang akan dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Renja 2022.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat berjalan secara optimal. Apabila dalam periode pelaksanaan Rencana Kerja ini dihadapkan pada hal-hal yang membuat Rencana Kerja tidak dapat dilaksanakan maka ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai dengan situasi dan kondisi.

LAMPIRAN

LAMPIRAN RANCANGAN RENJA 2022

**Tabel 5-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)*
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Tabel TC.29) Sesuai Program RPJMD**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)(2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)(2018)	Realisasi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.07	Urusan: Ketenagakerjaan									
1.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1.07.01.01.033	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
1.07.01.01.034	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Tersedianya pelayanan perkantoran 100%	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
1.07.01.01.035	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%

1.07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1.07.01.02.108	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
1.07.01.02.109	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Terpeliharanya rumah dan gedung 100%	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
1.07.01.02.111	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
1.07.01.02.112	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
1.07.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
1.07.01.05.033	Pengembangan ISO	Kualitas manajemen layanan sesuai standar mutu	3 sertifikasi	3 sertifikasi	3 sertifikasi	3 sertifikasi	100%	3 sertifikasi	3 sertifikasi	100%
1.07.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
1.07.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja OPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra&IKU)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1.07.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan OPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 10 program 29 kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.07.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan OPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Rancangan Renstra untuk lampiran keputusan Gubernur Tentang Penetapan Renstra 2018-2022 ,Penyusunan PTKD DIY	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.07.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan OPD	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.07.01.05.007	Pembinaan,Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Penilaian angka kredit jabatan fungsional	57 orang	100%	57 orang	57 orang	100%	57 orang	57 orang	100%
1.07.01.21	PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN STANDARISASI DAN PEMAGANGAN									
1.07.01.21.001	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	Sertifikasi Uji Kompetensi	80 orang	190 orang	600 orang	600 orang	100%	600 orang	600 orang	100%
1.07.01.21.002	Pemagangan Tenaga Kerja	Meningkatnya kesiapan peserta untuk mengikuti seleksi pemagangan ke Jepang	20 orang	40 orang	40 orang	40 orang	100%	40 orang	40 orang	100%
1.07.01.21.003	Pembinaan Lembaga Pelatihan	Lembaga Pelatihan Yang Terstandarisasi	85 lembaga	85 lembaga	85 lembaga	85 lembaga	100%	85 lembaga	85 lembaga	100%
1.07.01.22.	PROGRAM PENEMPATAN,PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI									

1.07.01.22.00 1	Pembentukan Kesempatan Kerja	Terlaksananya kegiatan pembuatan/perbaikan sarana infrastruktur masyarakat melalui sistem padat karya, Pelatihan TKM	57 lokasi 80 orang	45 lokasi	45 lokasi	45 lokasi	100%	45 lokasi	45 lokasi	100%
1.07.01.22.0	Penempatan Tenaga Kerja	Penempatan kesempatan kerja	100 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	100%	1000 orang	1000 orang	100%
1.07.01.16.08 3	Penyediaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja	Lowongan pekerjaan terisi 15%	0 orang	3000 orang	3000 orang	3000 orang	100%	3000 orang	3000 orang	100%
1.07.01.16.08 4	Pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja	Pemantauan lembaga penempatan	0	104 BKK dan 125 perusahaan	104 BKK dan 125 perusahaan	104 BKK dan 125 perusahaan	100%	104 BKK dan 125 perusahaan	104 BKK dan 125 perusahaan	100%
1.07.01.16.08 6	Penyelenggaraan Transmigrasi	Penyelenggaraan Transmigrasi	0 KK	40 KK	40 KK	36 KK	96%	40 KK	40 KK	100%
1.07.01.19	PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN									
1.07.01.19.01	Pemeriksaan dan pengawasan K3	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3	280 perusahaan	650 perusahaan	650 perusahaan	650 perusahaan	100%	400 perusahaan	400 perusahaan	
1.07.01.19.02	Pembinaan Norma Kerja	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja	280 perusahaan	650 perusahaan	650 perusahaan	650 perusahaan	100%	400 perusahaan	400 perusahaan	100%
1.07.01.20.	PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL									

1.07.01.20.014	Pembinaan Hubungan Industrial	Pemantauan Tentang Hubungan Industrial perusahaan	30 perusahaan	95 perusahaan	95 perusahaan	95 perusahaan	100%	95 perusahaan	95 perusahaan	100%
1.07.01.20.18	Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	Pemantauan tentang pengupahan dan penetapan upah minimum provinsi	5 kab kota	5 kab kota	5 kab kota	5 kab kota	100%	5 kab kota	5 kab kota	100%
1.07.01.23	PROGRAM PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA									
1.07.01.23.01	Pengujian lingkungan kerja, pemeriksaan Kesehatan kerja, Pelatihan Hiperkes dan KK	Pengujian lingkungan kerja, pemeriksaan Kesehatan kerja, Hiperkes dan KK	40 UMKM/^0 Perusahaan, 220 orang	610 orang/40 UMKM	610 orang/70 UMKM	610 orang/70 UMKM	100%	610 orang/70 UMKM	610 orang/70 UMKM	100%
1.07.01.015	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA									
1.07.01.15.076	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	Tenaga kerja terlatih terampil	0	1140 orang	1280 orang	1280 orang	100%	360 orang	360 orang	100%

Lampiran Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Tabel TC.29) Sesuai Program Permendagri 90 th 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)(2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)(2020)	Realisasi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.07.1.07.01.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi									
1.07.1.07.01.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (P90)*									
1.07.1.07.01.00.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (K90)*									
1.07.1.07.01.00.01.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (S90)*	Tersedianya gaji ASN dan tenaga bantu	1 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	1 tahun	1 tahun	100%
1.07.1.07.01.00.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (K90)*									

1.07.1.07.01.0 0.01.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (S90)*	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	
1.07.1.07.01.0 0.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.01.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (S90)*	kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun	24 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	24 orang	24 orang	100%
1.07.1.07.01.0 0.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.01.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (S90)*	Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Induk (10 jenis), BLKPP (15 jenis), Balai K3 (8 jenis)	1 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	1 tahun	1 tahun	100%
1.07.1.07.01.0 0.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.01.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (S90)*	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Induk (13 jenis), BLKPP (8 jenis), Balai K3 (6 jenis)	1 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	1 paket	1 paket	100%
1.07.1.07.01.0 0.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.01.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (S90)*	Penyediaan peralatan rumah tangga: Induk (9 jenis), BLKPP (21 jenis), Balai K3 (16 jenis)	1 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	1 paket	1 paket	100%

1.07.1.07.01.0 0.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.01.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (S90)*	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	3 paket	3 paket	100%
1.07.1.07.01.0 0.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.01.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (S90)*	Langganan surat kabar 3 jenis	3 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	3 jenis	3 jenis	100%
		Perawatan buku	375 buku					375 buku	375 buku	100%
1.07.1.07.01.0 0.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.01.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (S90)*	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	1 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	1 tahun	1 tahun	100%
1.07.1.07.01.0 0.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.01.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (S90)*	Penatausahaan arsip dinamis	1 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	1 tahun	1 tahun	100%
1.07.1.07.01.0 0.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.01.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (S90)*	Penyediaan jasa surat menyurat	1 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	1 tahun	1 tahun	100%
1.07.1.07.01.0 0.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.01.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (S90)*	langganan aplikasi pertemuan daring	1 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	1 tahun	1 tahun	100%
		pembayaran tagihan listrik air dan	1 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	1 tahun	1 tahun	100%

		telepon								
1.07.1.07.01.0 0.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.01.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (S90)*	penyediaan jasa pelayanan umum	1 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	1 tahun	1 tahun	100%
1.07.1.07.01.0 0.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.01.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (S90)*	Biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan	1 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	1 tahun	1 tahun	100%
1.07.1.07.01.0 0.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.01.09.005	Pemeliharaan Mebel (S90)*	pemeliharaan mebel	3 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	3 paket	3 paket	100%
1.07.1.07.01.0 0.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.01.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (S90)*	pemeliharaan kendaraan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	1 tahun	1 tahun	100%
1.07.1.07.01.0 0.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (K90)*									

1.07.1.07.01.0 0.01.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (S90)*	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	3 paket	3 paket	100%
1.07.1.07.01.0 0.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.01.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (S90)*	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	7 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	7 paket	7 paket	100%
1.07.1.07.01.0 0.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.01.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (S90)*	pemeliharaan perlengkapan kantor	8 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	8 jenis	8 jenis	100%
1.07.1.07.01.0 0.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.01.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (S90)*	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Dokumen perencanaan renstra dan renja	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	2 dokumen	100%
		sosialisasi program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	2 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	2 kali	2 kali	100%
1.07.1.07.01.0 0.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (K90)*									

1.07.1.07.01.0 0.01.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (S90)*	penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%
		penyusunan laporan kinerja	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.07.1.07.01.0 0.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.01.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (S90)*	Pengadaan mobil operasional dinas Balai K3	1 buah	N/A	N/A	N/A	N/A	1 buah	1 buah	100%
1.07.1.07.01.0 0.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.01.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (S90)*	Penilaian angka kredit JFT	1 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	1 tahun	1 tahun	100%
1.07.1.07.01.0 0.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.01.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (S90)*	Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun	8 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	8 orang	8 orang	100%
1.07.1.07.01.00.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA (P90)*									
1.07.1.07.01.0 0.02.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.02.01.001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro (S90)*	Penyusunan dokumen data ketenagakerjaan	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.07.1.07.01.0 0.02.01.002	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro (S90)*	Penyusunan dokumen perencanaan tenaga	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%

		kerja mikro								
1.07.1.07.01.00.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (P90)*									
1.07.1.07.01.0 0.03.03	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.03.03.001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah (S90)*	Konsultasi Produktivitas Perusahaan	20 perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.07.1.07.01.0 0.03.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.03.04.001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja (S90)*	pelatihan peningkatan produktivitas	40 perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		pengukuran produktivitas tenaga kerja dan perusahaan	40 perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Workshop hasil pengukuran produktivitas	1 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.07.1.07.01.0 0.03.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.03.01.001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (S90)*	Pelatihan Keterampilan Pencari Kerja Institusional	6 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	6 paket	6 paket	100%
		Pelatihan Ketrampilan Mobile Training Unit	41 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	40 paket	40 paket	100%
		Pelatihan pra seleksi pemagangan ke	40 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	100%

		Jepang								
		Pemagangan perusahaan bagi pencari kerja	180 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	160 orang	160 orang	100%
		Sertifikasi Uji kompetensi	300 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	300 orang	300 orang	100%
1.07.1.07.01.0 0.03.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.03.02.001	Survey dan Penilaian Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja (S90)*	Lembaga pelatihan kerja yang terstandarisasi	85 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	85 lembaga	85 lembaga	100%
		Rakor HILSI (Himpunan Lembaga Latihan Kerja Seluruh Indonesia)	1 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kali	1 kali	100%
1.07.1.07.01.00.04	PROGAM PENEMPATAN TENAGA KERJA (P90)*									
1.07.1.07.01.0 0.04.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah ProvinsiPelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.04.04.001	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) (S90)*	Pembinaan Pencegahan PMI Unprosedural	10 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	10 lembaga	10 lembaga	100%
1.07.1.07.01.0 0.04.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.04.01.002	Pelayanan Antar Kerja (S90)*	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan	1 layanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

		Sosialisasi bagi perusahaan pengguna TKA dan penyandang disabilitas	100 perusahaan					100 perusahaan	100 perusahaan	100%
1.07.1.07.01.0 0.04.03	Pengelola Informasi Pasar Kerja (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.04.03.002	Pelayanan Penyedia Informasi Pasar Kerja Online (S90)*	Layanan kios 3 in 1	1 layanan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 layanan	1 layanan	100%
		Pemuktahiran (Updating) Informasi Pasar Kerja	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	100%
1.07.1.07.01.0 0.04.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.04.01.003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja (S90)*	Bimngan Jabatan Bagi Pencari Kerja	300 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Penyuluhan Penempatan Tenaga Kerja	300 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.07.1.07.01.0 0.04.03	Pengelola Informasi Pasar Kerja (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.04.03.003	Job Fair/Bursa Kerja (S90)*	Penyelenggaraan Bursa Kerja	1 layanan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 layanan	1 layanan	100%
1.07.1.07.01.0 0.04.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.04.01.004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) (S90)*	Bimtek Petugas Bursa Kerja	30 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Evaluasi kinerja lembaga penempatan	220 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.07.1.07.01.0 0.04.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Pelindungan PMI								

	(Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.04.04.004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan (S90)*	Pembekalan Kewirausahaan Purna PMI	50 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.07.1.07.01.0 0.04.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.04.01.005	Perluasan Kesempatan Kerja (S90)*	Padat Karya Infrastruktur	15 lokasi	N/A	N/A	N/A	N/A	110 lokasi	110 lokasi	100%
		Pembekalan kewirausahaan Bagi Angkatan Kerja Khusus	40 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	40 orang	40 orang	100%
		Pembekalan Kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri	50 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	400 orang	400 orang	100%
1.07.1.07.01.00.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL (P90)*									
1.07.1.07.01.0 0.05.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.05.03.001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) (S90)*	Bimtek Struktur dan Skala Upah	90 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	90 orang	90 orang	100%
		Koordinas Dewan Pengupahan	5 kab/kota	N/A	N/A	N/A	N/A	5 kab/kota	5 kab/kota	100%
		Pemantauan THR dan Penangguhan	5 kab/kota	N/A	N/A	N/A	N/A	5 kab/kota	5 kab/kota	100%

		Upah Minimum								
		Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten Kota (UMP dan UMK)	2 SK Gub	N/A	N/A	N/A	N/A	2 SK Gub	2 SK Gub	100%
1.07.1.07.01.0 0.05.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.05.02.001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi (S90)*	Bimtek Pembinaan Hubungan Industrial (HI) bagi Siswa SMK	900 siswa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan	30 orang/2akt	N/A	N/A	N/A	N/A	30 orang/2akt	30 orang/2akt	100%
		Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama	30 orang/1 akt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Bimtek Teknik Negosiasi	30 orang/1 akt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Pemantauan perusahaan yang melaksanakan sarana HI	400 perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	400 perusahaan	400 perusahaan	100%
		Peningkatan Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	5 anjuran/PB	N/A	N/A	N/A	N/A			
		Peningkatan pemahaman penyelesaian	30 orang/2 akt	N/A	N/A	N/A	N/A	30 orang/2 akt	30 orang/2 akt	100%

		perselisihan HI								
		Peringatan Hari Buruh	400 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	400 orang	400 orang	100%
		Sosialisasi Sarana HI	30 orang/1 akt	N/A	N/A	N/A	N/A	90 orang	90 orang	100%
1.07.1.07.01.0 0.05.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.05.01.003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (S90)*	Verifikasi Serikat Pekerja / Buruh	400 PUK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.07.1.07.01.0 0.05.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.05.02.004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi (S90)*	Sidang lembaga kerjasama tripartit	6 sdiang/kesepakatan	N/A	N/A	N/A	N/A	6 sdiang/kesepakatan	6 sdiang/kesepakatan	100%
1.07.1.07.01.0 0.05.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK),									

	dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.05.03.005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (S90)*	Diseminasi SJSN	90 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Pembinaan Kesejahteraan Pekerja/Buruh	182 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	182 orang	182 orang	100%
		Rakor Jamsostek	90 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.07.1.07.01. 00.06	PROGRAM PENGAWASAN KETANAGAKERJAAN (P90)*									
1.07.1.07.01.0 0.06.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan (K90)*									
1.07.1.07.01.0 0.06.01.001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan (S90)*	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3	400 perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	400 perusahaan	400 perusahaan	100%
		Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja	400 perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	400 perusahaan	400 perusahaan	100%
1.07.1.07.01.0 0.06.01.003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan (S90)*	.	.	N/A	N/A	N/A	N/A	.	.	
		Pemeriksaan kesehatan kerja pada perusahaan	950 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	950 orang	950 orang	100%
		Sertifikasi hiperkes dan KK	150 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	150 orang	150 orang	100%
2	Pilihan									
2.08	TRANSMIGRASI									
2.08.1.07.01. 00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi									

2.08.1.07.01.00.02	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI (P90)*									
2.08.1.07.01.00.02.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (K90)*									
2.08.1.07.01.00.02.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (S90)*	Fasilitasi kerjasama antar daerah	1 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.08.1.07.01.00.02.01.004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi (S90)*	Penyelenggaraan Transmigrasi	30 KK	N/A	N/A	N/A	N/A	30 KK	30 KK	100%
2.08.1.07.01.00.02.01.006	Pelatihan Transmigrasi (S90)*	Peningkatan kapasitas SDM translok	40 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

බාහිර සේවකයන් සඳහා සේවය



Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman (55282),
Telp (0274)885147, Faks (0274)885036

Website : nakertrans.jogjaprov.go.id; Email : disnakertrans@jogjaprov.go.id